



Laporan Kinerja

Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa
dan Sastra

2022



**MERDEKA
BELAJAR**

Revitalisasi Bahasa Daerah

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

KATA PENGANTAR



**KEPALA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt., Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 dengan tepat waktu.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, dan wujud transparansi/pertanggungjawaban kepada masyarakat, selain itu, laporan ini merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap Kelompok Kepakaran Layanan Profesional (KKLP) di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra (Pusbanglin).

Pada tahun 2022 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menetapkan tiga sasaran kegiatan dan empat indikator kinerja kegiatan dan berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai keberhasilan pencapaian.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktifitas kinerja seluruh sumber daya manusia di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga mewujudkan kinerja *Good Governance*, dan *Clean Government*.

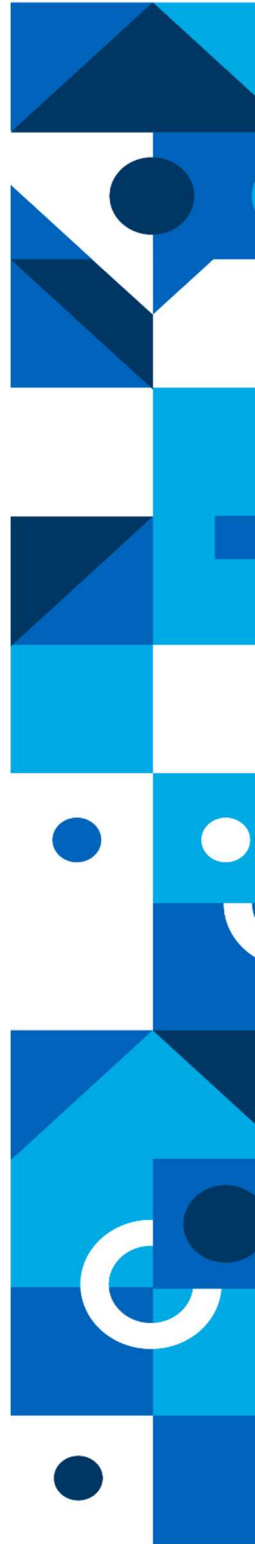
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun 2022.

Bogor, 24 Januari 2023
Kepala Pusat Pengembangan
dan Pelindungan Bahasa dan Sastra,



Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum.
NIP. 196605201991031004

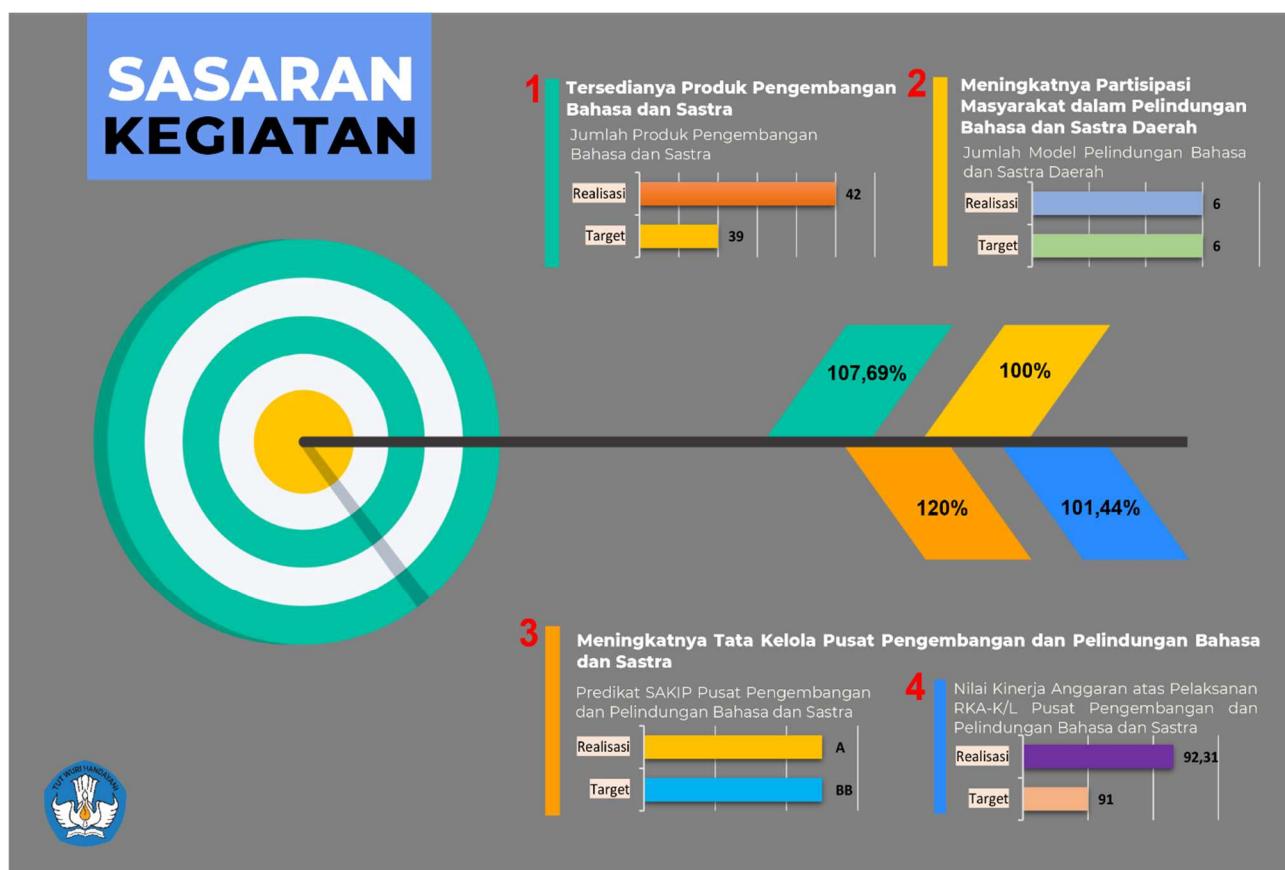
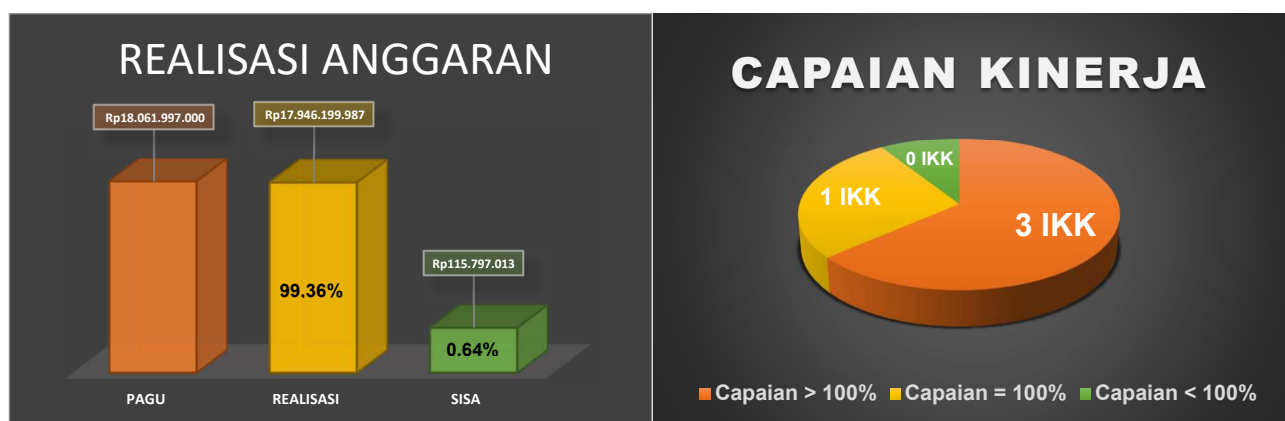
i	KATA PENGANTAR
ii	DAFTAR ISI
iii	IKHTISAR EKSEKUTIF
1	BAB I. PENDAHULUAN
1	GAMBARAN UMUM
3	DASAR HUKUM
4	TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI
5	ISU-ISU STRATEGIS DAN PERAN STRATEGIS ORGANISASI
7	BAB II. PERENCANAAN KINERJA
7	VISI DAN MISI
7	RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH
8	TUJUAN STRATEGIS
10	BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
10	CAPAIAN KINERJA
10	SASARAN KEGIATAN I
12	INDIKATOR KEGIATAN I.I
26	SASARAN KEGIATAN II
28	INDIKATOR KEGIATAN II.I
40	SASARAN KEGIATAN III
40	INDIKATOR KEGIATAN III.I
43	INDIKATOR III.II
54	BAB IV. PENUTUP
54	SIMPULAN
55	FOKUS PERBAIKAN
57	LAMPIRAN



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian tiga sasaran kegiatan dengan empat indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja secara detail diuraikan pada bab III.

Secara umum, capaian Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Berikut beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul.

HAMBATAN

LANGKAH ANTISIPASI

Pindahnya staf-staf peneliti ke BRIN, yang konsep awal kegiatan dan peta jalan kegiatan mayoritas dikerjakan oleh staf-staf tersebut.

Mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan, pelaksana kegiatan yang terkait dan konsep kegiatan serta mematangkan rancangan kegiatan yang sudah direncanakan.

Beberapa kegiatan yang baru dilaksanakan pada tahun ini mengalami kendala karena kegiatan belum terkonsep dan terancang dengan matang.

Membangun komunikasi intensif dengan pakar dan narasumber dalam membentuk kegiatan yang stabil.

Media simpan pladen tidak berfungsi karena sudah terlalu penuh.

Mengajukan peningkatan layanan awan ke Pusdatin.

Adanya *automatic adjustment* dan tingginya biaya produksi pembuatan film animasi berakibat pada keterbatasan anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan berkolaborasi dan melibatkan unsur-unsur pentahelik (pemerintah, akademisi, badan usaha/industri, masyarakat/komunitas, dan media).

Adanya beberapa ketidaksepakatan pada beberapa kegiatan karena buruknya pemahaman mengenai regulasi dan buruknya komunikasi pelaksana kegiatan, konsultan, pemangku kepentingan dan pakar/narasumber.

Mengadakan pertemuan intensif guna membahas regulasi yang terkait.

Kurangnya komitmen dan konsistensi dalam mematuhi jadwal pelaksanaan anggaran.

Melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan disertai dengan prognosis pada masing-masing kegiatan.

BAB

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra merupakan satuan kerja yang berada di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa). Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pertama kali dibentuk pada bulan Desember tahun 2010, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 dengan nama Pusat Pengembangan dan Pelindungan. Pada tahun 2019 terjadi kembali perubahan nomenklatur menjadi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dengan disahkan melalui Permendikbud Nomor 9 tahun 2019.



Perkembangan Nomenklatur
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Pada tahun 2022 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dipimpin oleh Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum. sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dengan jumlah SDM sebanyak 80 pegawai (70 PNS dan 10 PPNPN). Untuk menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melaksanakan rincian tugas melaksanakan analisis pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra. Untuk itu dalam mewujudkan kinerja pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra dengan hasil maksimal dibutuhkan kelompok jabatan administrasi (JA), jabatan fungsional (JF), dan jabatan pimpinan tinggi (JPT).

Sesuai dengan kebijakan pimpinan dalam rangka memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsi dan profesionalisme maka Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa membentuk 10 KKLP (Kelompok Keahlian dan Layanan Profesional) yang menaungi jabatan teknis. Pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra terdapat 2 KKLP, yaitu KKLP Perkamusan dan Peristilahan dan KKLP Pelindungan dan Pemodernan yang masing-masing merupakan naungan staf teknis dalam melaksanakan tugas secara profesional. Sebelum tahun 2022 beban pekerjaan yang terkait analisis pengembangan dan pelindungan Bahasa dan sastra dibebankan pada jabatan fungsional peneliti namun mulai tahun 2023 dialihkan fungsinya ke jabatan fungsional Widyabasa. Jabatan fungsional Widyabasa memiliki tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan dalam hal pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Sedangkan dalam rangka penataan sumber daya manusia terkait dengan tugas dan fungsi penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan), maka terdapat beberapa kelompok jabatan fungsional tertentu (peneliti) melakukan integrasi dan peleburan ke BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dengan diikuti perpindahan pegawai terkait. Wilayah kerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



B. DASAR HUKUM

Dalam melaksanakan penyusunan program kerja, anggaran, dan laporan, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mengacu pada peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020--2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024;
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan

18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ;
20. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
21. Peraturan Dirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L; dan
22. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0272/I/PR.00.02/2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024.

C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mempunyai tugas dan fungsi.

TUGAS

Melaksanakan Penyiapan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

FUNGSI



STRUKTUR ORGANISASI

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra terdiri atas satu Kepala Pusat (eselon II), satu Kepala Subbagian Tata Usaha (eselon IV), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah sebagai berikut.



Struktur Organisasi
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

D. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERAN STRATEGIS ORGANISASI

1. Isu-isu Strategis

1. Rendahnya sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra di Indonesia sebagai kekayaan dan warisan budaya bangsa.
2. Perlunya menyediakan produk-produk kebahasaan dan kesastraan serta akses yang mudah bagi masyarakat untuk menggunakannya dalam rangka menunjang peningkatan kemampuan literasi di Indonesia
3. Luasnya jangkauan wilayah pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra.
4. Masyarakat di daerah (terutama generasi muda) cenderung mulai meninggalkan bahasa daerah.
5. Adanya kebutuhan terhadap peta sastra nusantara.
6. Perlunya pewarisan sastra lisan yang terancam punah melalui revitalisasi sastra.
7. Perlunya penghargaan kepada sastrawan daerah dan pelaku tradisi lisan atas karya-karyanya dan komunitas sastra dalam rangka penguatan dalam bidang kesastraan sebagai penggerak dan penguat dalam membangun karakter bangsa.
8. Perlunya model pelindungan bahasa dan sastra sebagai regulasi rujukan bagi seluruh stake holder dan penerima manfaat dalam melindungi dan menjaga kelestarian sastra di nusantara.

9. Perlunya pemutakhiran yang berkesinambungan terhadap produk kebahasaan dan kesastraan yang selaras dengan perkembangan zaman.
10. Sumber daya manusia bidang pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang terbatas jumlahnya dan kualifikasi kompetensi yang kurang memadai.
11. Sumber daya anggaran yang terbatas dan blokir *automatic adjustment* mengakibatkan beberapa pencapaian tidak maksimal secara kualitas.
12. Kolaborasi dan sinergitas dalam pencapaian kinerja dengan melibatkan berbagai pihak secara holistik dan komprehensif.

2. Peran Strategis

1. Berperan penting dalam penguatan manajemen dan tata kelola yang berkualitas untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra.
2. Berperan penting dalam melestarikan dan mengembangkan Bahasa dan Sastra di nusantara.
3. Berperan penting dalam pelaksanaan pengembangan dan perlindungan Bahasa dan Sastra.
4. Berperan penting dalam melakukan pembakuan dan kodifikasi Bahasa dan Sastra.
5. Berperan penting dalam menyediakan produk-produk kebahasaan dan kesastraan.



II

BAB PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI



VISI Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mengacu kepada visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang tertuang dalam rencana strategis tahun 2020—2024 yang mengacu kepada visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020—2024 melalui bahasa dan sastra, yaitu Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif dengan bahasa dan sastra.

Untuk mencapai visi dan misi Kemendikbudristek dalam mewujudkan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Pengembangan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam Pendidikan.
2. Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.
3. Mewujudkan kelestarian bahasa daerah.
4. Mengoptimalkan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

B. RENCANA KINERJA JANGKA MENENGAH

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2020--2024, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menetapkan sasaran, indikator kinerja dan target selama lima tahun sebagai berikut.

Kode	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Perjanjian Kinerja		
		2022	2023	2024
SK	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra			
IKK	Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	40	41	43
SK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra			
IKK	Jumlah model perlindungan bahasa dan sastra	6	6	8
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa			
IKK	Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	BB	BB	BB
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	91	91	91

C. TUJUAN STRATEGIS

Berdasarkan tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan tujuan yang lalu di turunkan lagi menjadi tujuan pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, yaitu:

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Keberhasilan
Meningkatnya kelestarian Bahasa daerah	Indeks pemanfaatan Bahasa daerah oleh penuturnya	20,54
Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	A

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020--2024, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2022, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Awal

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1. [SK 1] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	1.1 [IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	Produk	39
2. [SK 2] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam	2.1 [IKK 2.1] Jumlah model perlindungan bahasa dan sastra daerah	Model	6

	pelindungan bahasa dan sastra daerah				
3.	[SK 3] Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	3.1	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Predikat	BB
		3.2	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Nilai	91

Kode	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	10.674.463.000
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	9.275.729.000

Pada pelaksanaannya, di akhir tahun Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mengalami perubahan pagu anggaran. Pagu anggaran DIPA awal sebanyak Rp19.950.192.000,00 mengalami perubahan anggaran dengan realokasi belanja gaji pegawai ke Sekretariat Badan sebesar Rp643.195.000,00 dan realokasi pagu anggaran yang terblokir (*automatic adjustment*) ke BA BUN sebesar Rp1.245.000.000,00 Pada akhir tahun pagu anggaran pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menjadi Rp18.061.997.000,00 sehingga perlu dilakukan revisi perjanjian kinerja. Berikut adalah revisi perjanjian kinerja antara Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra.

Perjanjian Kinerja Akhir

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1.	[SK 1] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	1.1	[IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	Produk	39
2.	[SK 2] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah	2.1	[IKK 2.1] Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra daerah	Model	6
3.	[SK 3] Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	3.1	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Predikat	BB
		3.2	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Nilai	91

Kode	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	9.888.485.000
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	8.173.512.000

III

BAB AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2022, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menetapkan 3 sasaran kegiatan dengan 4 indikator kinerja kegiatan, dengan tingkat ketercapaian selama tahun 2022 sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	[SK 1] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	1.1	[IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	Produk	39	42	107,69%
2.	[SK 2] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah	2.1	[IKK 2.1] Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra daerah	Model	6	6	100%
3.	[SK 3] Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	3.1	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Predikat	BB	A	120%
		3.2	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Nilai	91	92,31	101,44%

1. Sasaran Kegiatan I

Tersedianya Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

Menipisnya batas-batas kebudayaan antardaerah dan antarbangsa sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi, telah membuka diskursus secara luas dan terus-menerus. Hal itu menuntut bahasa Indonesia untuk terus tumbuh dan dapat mengakomodasi perannya sebagai bahasa persatuan. Berbagai upaya tersistem telah dilaksanakan untuk menjaga dan

mendokumentasikan perkembangan bahasa Indonesia salah satunya dengan menyediakan produk-produk pengembangan bahasa. Produk pengembangan bahasa merupakan produk hasil kodifikasi norma kebahasaan yang disusun untuk menjadi acuan kebahasaan dan pedoman dalam penyusunan tata bahasa, tata aksara (ejaan), kamus, ensiklopedia, tesaurus, glosarium, korpus, dan acuan kebahasaan lain.

Tersedianya produk pengembangan bahasa dicapai melalui berbagai upaya seperti pemutakhiran Kamus Besar Bahasa Indonesia, inventarisasi kosakata, penyusunan kamus bidang ilmu, penyusunan kamus etimologi, penyusunan tata bahasa kontemporer, penyusunan kaidah kebahasaan, dan pelaksanaan sidang komisi istilah. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan secara konsisten untuk menjaga stabilitas ketersediaan produk pengembangan bahasa sehingga dapat menjadi alat untuk menyamakan persepsi terkait kebahasaan serta sebagai standar dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Selain produk pengembangan bahasa, Pusbanglin juga melaksanakan penyediaan produk pengembangan sastra. Sejarah telah mencatat bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang melimpah, salah satu di antaranya berupa karya sastra. Kekayaan budaya yang berwujud sastra itu bahkan telah hidup dan tumbuh sejak lama sebelum wilayah nusantara terbentuk sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada saat itu, sastra hidup dan tumbuh di berbagai wilayah kerajaan (keraton) yang salah satu di antaranya dikenal sebagai sastra manuskrip yang berupa naskah-naskah kuno (serat, babad, wulang, dll.) yang ditulis pada sesuatu yang sederhana dan seadanya (daun, kulit kayu, dll.). Di samping itu, sastra juga hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat (di luar keraton) yang salah satu wujudnya berupa tradisi (sastra) lisan (mitos, legenda, dongeng, peribasan, petatah-petitih, dll.). Karena wilayah nusantara dihuni oleh berbagai suku yang memiliki bahasa lokal (daerah) yang berbeda-beda, karya-karya sastra itu pun hidup dan tumbuh dalam berbagai bahasa daerah sehingga kemudian disebut sastra daerah (Melayu, Jawa, Sunda, Minang, Bali, Sasak, Bugis, dan seterusnya).

Tersedianya produk pengembangan sastra dilakukan dengan cara mengembangkan (memajukan, menguatkan, dan/atau memodernkan) sastra di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu memproduksi karya sastra dalam bentuk lain. Dengan kondisi zaman saat ini pendekatan alih wahana dan sastra siber (digital) sangat dirasa perlu dalam rangka mengembangkan bentuk karya sastra menjadi lebih diterima oleh masyarakat umum lebih mudah dan lebih luas.

1.1. Indikator Kinerja Kegiatan I.1

Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

Tabel
Target dan Realisasi IKK
Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Angka Dasar Tahun	Tahun 2022			Renstra		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1 Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	1.1 Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	12	39	42	107,69%	136	54	38,24%

Produk pengembangan bahasa adalah produk hasil kodifikasi norma kebahasaan yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan/atau bersama UPT untuk menjadi acuan kebahasaan dan pedoman dalam penyusunan tata bahasa, tata aksara (ejaan), kamus, ensiklopedia, tesaurus, glosarium, korpus, dan acuan kebahasaan lain. Manfaat produk pengembangan bahasa adalah sebagai standar dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Sementara, produk pengembangan sastra adalah produk yang dihasilkan melalui penyusunan bahan pengembangan sastra dan acuan kesastraan lain sehingga dapat digunakan secara lebih meluas dan dapat diakses secara lebih cepat oleh masyarakat. Bentuk-bentuk produk pengembangan sastra berupa, antara lain, buku prosiding, buku bunga rampai, jurnal ilmiah, buku ilmiah, buku acuan, buku pedoman, buku pengayaan pembelajaran sastra, produk alih wahana, dan produk digitalisasi sastra (vlog, video, pangkalan data sastra). Manfaat dari produk-produk pengembangan sastra, antara lain, memberi rekomendasi kepada pemangku kepentingan, menyampaikan informasi kesastraan kepada masyarakat, menyediakan bahan pengayaan pembelajaran sastra di sekolah dan di perguruan tinggi, serta pengembangan ilmu pengetahuan humaniora.

Metode penghitungan indikator kinerja jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra adalah dengan menghitung jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra yang dihasilkan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun tertentu. Pada tahun 2022 indikator jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra didukung oleh kegiatan dari produk kodifikasi bahasa dan produk pengembangan sastra.

Realisasi IKK jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra 2022 melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target sebanyak 39 produk telah terealisasi sebanyak 42 produk dengan persentase capaian sebesar 107,69%. Sepuluh produk tersebut dihasilkan dari Kodifikasi Bahasa:

1. Kamus Prinsip Dasar Teknologi Hijau
2. Kamus Ilmu Pertahanan subbidang Strategi Pertahanan Udara
3. Kamus Ilmu Pertahanan: Damai dan Resolusi Konflik

4. Kamus Budaya Betawi
5. Kamus Etimologi Bahasa Belanda
6. Kamus Etimologi Bahasa Latin
7. Kamus Etimologi Bahasa Arab
8. Aplikasi Penyuntingan Ejaan Bahasa Indonesia (SIPEBI)
9. Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD)
10. Tata Bahasa Indonesia Kotemporer (TBIK)

Disamping 10 produk pengembangan bahasa, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra juga menghasilkan 32 produk pengembangan sastra dalam bentuk alihwahana film animasi, yaitu:

No	Judul Film	Sumber Cerita	Daerah Asal
1	Kisah Putri Siti Ainun	Legenda Danau Bungara	Daerah Istimewa Aceh
2	Sumpah Sampuraga	Legenda Sampuraga	Sumatra Utara
3	Asal-Usul Danau Maninjau	Asal Usul Danau Maninjau	Sumatra Barat
4	Kisah Putri Pinang Masak	Putri Pinang Masak	Sumatra Selatan
5	Menyelamatkan Putri Kaca Mayang	Putri Kaca Mayang	Riau
6	Rangkayo dan Angsa Kembar	Rangkayo Hitam	Jambi
7	Gadis dan Bangau Ajaib	Legenda Batang Bangau	Bengkulu
8	Petualangan Lima Beradik	Legenda Gunung Lima Beradik	Kepulauan Riau
9	Pohon Wangi Mayat	Bau Wangi Taru Menyan	Bali
10	Mantra Sakti si Aji	Legenda Aji Saka	Jawa Tengah
11	Puteri Suara Merdu	Puteri Mayang	Kepulauan Bangka Belitung
12	Amarah Krakatau	Legenda Gunung Krakatau	Lampung
13	Anak Tambak Sakti	Legenda Sarip Tambak Oso	Jawa Timur
14	Semangat, Nak!	Legenda Budak Buncireun: Mapay Cai	Banten
15	Burung Kera si Jago Ayam	Legenda Ciung Wanara	Jawa Barat
16	Pohon Pengilham	Legenda Karang Waru	Daerah Istimewa Yogyakarta
17	Teduhnya Bukit Kelam	Legenda Bukit Kelam	Kalimantan Barat
18	Membelah Ulin di Barito	Legenda Pulau Kambang	Kalimantan Selatan
19	Lu Lu Lu Lu, Kiu!	Legenda Tambun Bungai	Kalimantan Tengah
20	Pesut, Siut!	Legenda Pesut Mahakam	Kalimantan Timur

21	Mallomo	Nenek Mallomo	Sulawesi Selatan
22	Si Kesik Hitam	Kesik (Burung Kesik Hitam)	Sulawesi Tengah
23	Tak Ada Ikan di Dalam Igi	Bulilin dan Seledan	Sulawesi Utara
24	Terima Kasih, Lahilote!	Lahilote	Gorontalo
25	Petualangan Si Aga	Nenek Luhu	Maluku
26	Putri Rabanga	Putri Mandalika	Nusa Tenggara Barat
27	Fokus, Kuskus & Maruna	Asal Usul Danau Sentani	Papua
28	Ali & Macan Kemayoran	Murtado Macan Kemayoran	Daerah Khusus Ibukota Jakarta
29	Pulau Kertas	Kisah Boki Dehegila	Maluku Utara
30	Wa Odhe	Wa Odhe Lumangke	Sulawesi Tenggara
31	Tekad	Watu Timbang Raung	Nusa Tenggara Timur
32	Mira, Sang Juara	Mirah, Singa Betina Marunda	Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pada tahun-tahun sebelum 2022, indikator produk pengembangan bahasa dan sastra belum muncul dan baru di munculkan pada revisi Renstra BPP Bahasa 2020—2024. Indikator ini terdiri atas produk yang dihasilkan pada kegiatan kodifikasi bahasa dan kegiatan pengembangan sastra. Pada tahun 2021 satuan produk kodifikasi bahasa masih berupa kosakata, belum menggunakan produk dengan indikator kinerja ‘jumlah kosakata bahasa Indonesia’. Pada 2021 tersebut terealisasi sebanyak 27.048 kosakata dari target sebanyak 21.287 kosakata, sedangkan pada satuan produk pengembangan sastra dahulu sudah menggunakan produk namun dengan nama kegiatan pemodernan sastra dengan indikator kinerja ‘jumlah produk kesastraan terkembangkan’ dengan realisasi 30 produk dari target sebanyak 30 produk.

Target akhir Renstra revisi 2020—2024 untuk jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra adalah sebanyak 136 produk. Sampai dengan tahun 2022 sudah terealisasi sebanyak 54 produk pengembangan bahasa dan sastra.

Analisis program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja, yaitu sebagai berikut.

❖ **PRODUK PENGEMBANGAN BAHASA**

Tahun 2022 Tim Perkamusian dan Peristilahan telah menyusun empat buah kamus bidang ilmu, yakni Kamus Prinsip Dasar Teknologi Hijau, Kamus Ilmu Pertahanan subbidang Strategi Pertahanan Udara, Kamus Ilmu Pertahanan: Damai dan Resolusi Konflik, dan Kamus Budaya Betawi. Kamus Bidang Ilmu merupakan kamus yang digunakan sebagai rujukan yang memuat sejumlah istilah yang disusun secara alfabetis disertai dengan definisinya. Kamus Bidang Ilmu sangat diperlukan untuk memperluas wawasan para ilmuwan khususnya para dosen, mahasiswa, penerjemah, dan lain-lain ketika mereka memerlukan padanan dan makna suatu kata. Kamus ini dapat memberikan informasi

tentang istilah khusus suatu bidang ilmu, padanan, dan maknanya. Kamus Bidang Ilmu ini menjadi penting karena memuat istilah, padanan, dan definisi dari berbagai bidang ilmu. Pada tahun 2022 ini, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menyusun empat Kamus Bidang Ilmu dengan total 3.297 kosakata.



Kamus Bidang Ilmu yang Disusun pada Tahun 2022

Penyusunan Kamus Bidang Ilmu dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, pendefinisian, verifikasi, dan penyuntingan. Dalam pengumpulan data, penyusun mencari data dari berbagai terbitan, baik cetak maupun elektronik. Data itu lalu dicatat termasuk konteks, kelas kata, definisi (kalau ada), sumber konteks, dan sebagainya. Data hasil seleksi didefinisikan sesuai dengan konteks pemakaiannya dengan merujuk berbagai sumber, baik sumber cetak, lisan, maupun sumber elektronik (internet). Definisi didasarkan pada prinsip-prinsip leksikografi dan ejaan yang benar. Data yang sudah didefinisikan dan dianggap layak kemudian diverifikasi melalui Sidang Komisi Istilah (SKI) untuk melihat kesesuaian dengan ejaan dan memenuhi syarat dalam penguasaan bahasa dan prinsip-prinsip leksikografi. Pada tahap tersebut, dilakukan verifikasi entri tertentu kepada ahlinya sebelum ditetapkan sebagai entri dalam kamus. Setelah substansi dalam definisi diverifikasi, entri beserta penjelasannya kemudian disunting secara bahasa sesuai dengan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurkan (EYD) dan sesuai dengan prinsip leksikografi.

Selain Kamus Bidang Ilmu, pengembangan kamus dilakukan dengan penyusunan kamus etimologi. Kosakata bahasa Indonesia saat ini banyak menyerap kosakata dari bahasa asing, seperti bahasa Inggris, Arab, Cina, Belanda, Jawa Kuno, dan sebagainya. Penyerapan kosakata tersebut dilakukan melalui berbagai cara, yaitu pepadanan, penerjemahan, dan penyesuaian penulisan dan pelafalan. Dalam KBBI, tidak semua kosakata yang terserap dari bahasa asing diberi label bahasa asal. Oleh karena itu, informasi etimologis perlu ditambahkan untuk kosakata yang diserap dari bahasa asing agar asal-asul kata tersebut jelas. Untuk menunjang hal itu, penyusunan kamus etimologi diperlukan.

Tahun 2022, penyusunan kamus etimologi berfokus pada penyuntingan informasi etimologis kosakata bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab, Belanda, dan Latin dengan jumlah entri untuk Kamus Etimologi Arab 300 entri, Kamus Etimologi Belanda 1000 entri, dan Kamus Etimologi Latin 300 entri.

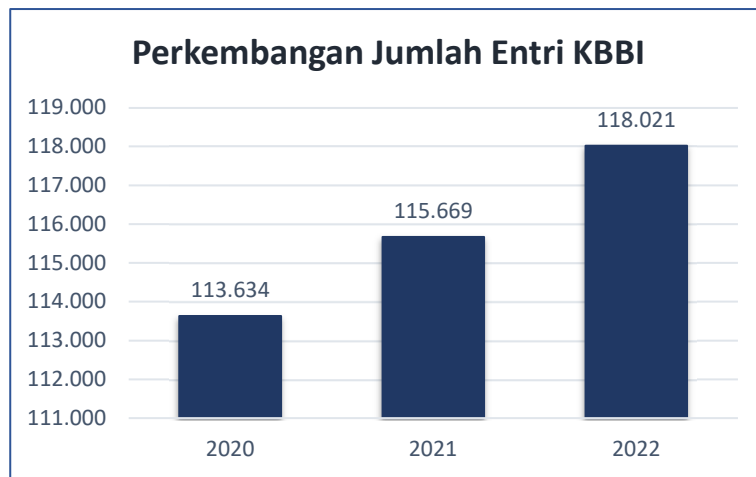
Hasil Penyuntingan Kamus Etimologi Arab

Hasil Penyuntingan Kamus Etimologi Belanda

No	nid	entri	n_logika	bahasa	entri (transliterasi)	entri (huruf a+1:isai)	makna	kelas kata	persona	jumlah	gender	kala	aspek	kasus
1		a fortiori	Parent	Latin	a fortiori ratione		lebih-lebih lagi; harfiah: berdasarkan perhitungan yang lebih kuat							
			And	Latin	a		dari	partikel						
			and	Latin	fortior		lebih kuat	adj		sg	f			abl
			and	Latin	ratio-rationis		perhitungan	n		sg	f			abl
2		a posteriori	Parent	Latin	a posteriori		tt simpulan yg diambil dr pengalaman dr akibat ke sebab, dr peristiwa (keadaan) yg khusus ke peristiwa (keadaan) yg umum; induktif; harfiah: dari yang paling belakang, dari yang terjadi paling akhir							
			And	Latin	a		dari	partikel						
			>	Latin	posterus,-a,-um		yang kemudian, yang belakangan	adj		sg	n			abl
			>	ket. lambang										
			>	> bermakna berasal dari atau berubah menjadi urutan terbentuknya kata tsb										
			>	Latin	posterior		yang lebih kemudian, yang datang lebih belakangan	adj		sg				abl
3		ab initio	Parent	Latin	post		setelah, di belakang	partikel ukp						
			And	Latin	ab initio		dari permulaan, sejak awal							
			And	Latin	ab		dari	partikel						
4		ab initium	Parent	Latin	initium,-i		permulaan	n ukp		sg	n			abl

Hasil Penyuntingan Kamus Etimologi Latin

Selain melalui kamus bidang ilmu dan kamus etimologi, capaian kosakata bahasa Indonesia juga dikumpulkan melalui pemutakhiran Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Inventarisasi kosakata (berupa usulan). Alurnya, melakukan inventarisasi kosakata baru dalam bahasa Indonesia, kemudian menjangar dan memverifikasi kosakata baru. Usulan-usulan yang memenuhi syarat divalidasi untuk pemutakhiran KBBI. Kegiatan pemutakhiran KBBI dilaksanakan setiap tahun pada bulan April dan Oktober. Pada bulan April sebanyak 1138 entri baru telah ditambahkan dalam KBBI, pada bulan Oktober sebanyak 1244 juga telah ditambahkan. Dengan demikian total entri baru yang ditambahkan dalam KBBI pada tahun 2022 sebanyak 2.382 entri baru. Dari tahun ke tahun jumlah entri dalam KBBI terus-menerus mengalami peningkatan, berikut grafik perkembangannya.



Grafik Penambahan Entri KBBI

Selamat datang di KBBI Daring!
Pemutakhiran terakhir: Oktober 2022

Pencarian ...




- ! Pengumuman: Pengembangan Sipebi dibuka untuk urun daya!
- ! Halo Yosa! Sudahkah Anda mengecek [halaman manajemen akun Anda?](#)
- ! Informasi: usulan-usulan Anda, bantuan penggunaan, video panduan, unduh **Sipebi**
- ! Ketentuan Hukum: pelanggaran terhadap Hak Cipta KBBI Daring terancam hukuman pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**
[Baca selengkapnya »](#)

Unduh Aplikasi

Sipebi

Aplikasi Penyuntingan Ejaan Bahasa Indonesia

Menupakan aplikasi yang berfungsi untuk melakukan perbaikan/penyuntingan teks bahasa Indonesia secara otomatis. Aplikasi ini menggunakan pangkalan data KBBI termutakhir dan masukan para ahli bahasa sebagai basis datanya.

Windows

▲ Penting

Sipebi untuk Windows Operating System (OS) dijalankan menggunakan **.NET Framework 4.6.2** yang datang bersamaan dengan **Windows 10 1607**, yaitu Windows 10 edisi keluaran Juli 2016 ke atas. Jika Anda hendak menjalankan Sipebi pada Windows OS sebelum edisi tersebut (Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, dsb.), silakan instalasi **.NET Framework 4.6.2** pada komputer Anda terlebih dahulu. Penginstal luring **.NET Framework 4.6.2** dapat diunduh melalui halaman resmi Microsoft berikut:

[.NET Framework 4.6.2 Offline Installer](#)

Aplikasi Sipebi untuk Windows OS dapat diunduh melalui tautan berikut:

[Unduh Sipebi v1.0.1.0 \(Windows\)](#) Diunduh: 84.546 kali

Sipebi Dibuka untuk Urun Daya!

Semenjak awal tahun 2022, Sipebi resmi diluncurkan sebagai proyek urun daya. Sebagai ahli TI, ahli linguistik, atau pengguna awam Sipebi, Anda sekarang dapat berbagian dalam pengembangan Sipebi.

Temukan informasi selengkapnya [di sini](#)

Tampilan Laman KBBI Daring yang bertautan dengan Laman Pengunduhan SIPEBI

Selain bidang perkamusan, tim juga terus melakukan pengembangan pada Aplikasi Sistem Penyuntingan Bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan SIPEBI. SIPEBI telah populer digunakan oleh masyarakat sejak diluncurkannya pada tahun 2021. SIPEBI merupakan aplikasi penyuntingan bahasa yang berfungsi untuk melakukan perbaikan/penyuntingan teks bahasa Indonesia secara otomatis. Aplikasi tersebut menggunakan pangkalan data KBBI termutakhir dan masukan dari ahli bahasa. Aplikasi ini bersifat luring mudah alih (*portable*) dan dapat diunduh melalui KBBI Daring. Hingga Desember 2022, aplikasi SIPEBI sudah diunduh sebanyak 84.546 kali.

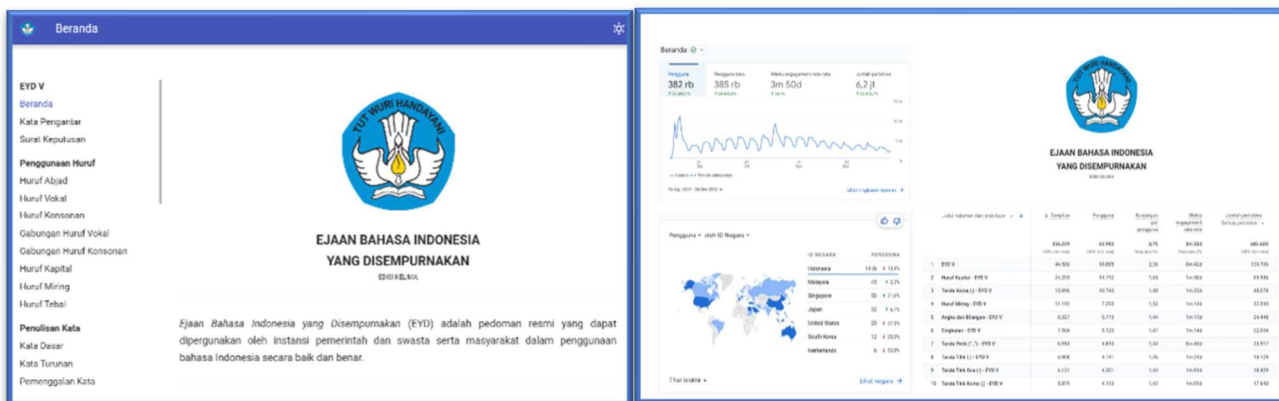
Pengembangan aplikasi SIPEBI sangat berpotensi menjadi proyek raksasa karena untuk menelaah jenis kesalahan bahasa tulis dibutuhkan data yang banyak dan memadai serta pemrograman yang sangat akurat untuk mendeteksi kesalahan tersebut. Oleh sebab itu, pembuatan aplikasi ini tidak dapat dibebankan hanya kepada seorang pengembang dan/atau pihak internal Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sehubungan dengan hal itu, pada bulan April 2022 aplikasi SIPEBI diluncurkan sebagai proyek urun daya semiterbuka. Dengan demikian, pengguna awam, kontributor linguistik, dan pengembang teknologi informasi yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan dan penyempurnaan SIPEBI dapat ikut serta dan memiliki cara atau platform standar dalam berkontribusi sesuai kapasitasnya. Sebagai proyek semiterbuka, data dan kode pemrograman SIPEBI yang bersifat nonkonfidensial diberikan kepada masyarakat. Di samping itu, SIPEBI versi beta juga diluncurkan agar masyarakat memiliki akses ke SIPEBI yang belum resmi, tapi termutakhir. SIPEBI versi beta dapat dimutakhirkan sewaktu-waktu jika terdapat pengembangan maupun fitur baru sebelum secara resmi dimasukkan ke dalam SIPEBI versi resmi jika pengembangan atau fitur tersebut telah bekerja dengan baik.

Tahun 2022, Tim Perkamusan dan Peristilahan juga telah menyelesaikan pemutakhiran Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) edisi kelima. EYD merupakan pedoman resmi yang dapat dipergunakan oleh instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Pelaksanaan pemutakhiran EYD dimulai tahun 2021 dan selesai tahun 2022 melalui empat tahapan, yakni tahap seleksi, elaborasi, verifikasi, dan validasi. Pemutakhiran pedoman ejaan edisi kelima ini kembali menggunakan nama EYD (Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan) karena nama tersebut lebih dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Indonesia sejak lama. Pada edisi keempat, pedoman ini dikenal dengan nama PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia). Kemudian pada edisi kedua (1987) dan edisi ketiga (2009), pedoman ini dikenal dengan nama PUEYD (Pedoman Umum Ejaan bahasa Indonesia yang Disempurnakan). Pada edisi pertama pedoman ini dikenal dengan nama EYD (Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan).

Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan edisi kelima ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa No. 0424/I/BS.00.01/2022 tentang Ejaan



Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. EYD edisi kelima ini ditetapkan bertepatan dengan 50 tahun sejak pertama kali ditetapkan pada 16 Agustus 1972. Secara umum perubahan yang terdapat dalam edisi ini di antaranya berupa penambahan kaidah baru dan perubahan kaidah yang telah ada. Selain itu, terdapat juga perubahan redaksi, perubahan contoh, dan perubahan tata cara penyajian. Secara keseluruhan, perubahan yang ada lebih dari 50 persen. Acuan kebahasaan lainnya, seperti Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia akan mengikuti perubahan sistem ejaan yang terdapat dalam EYD edisi kelima ini.



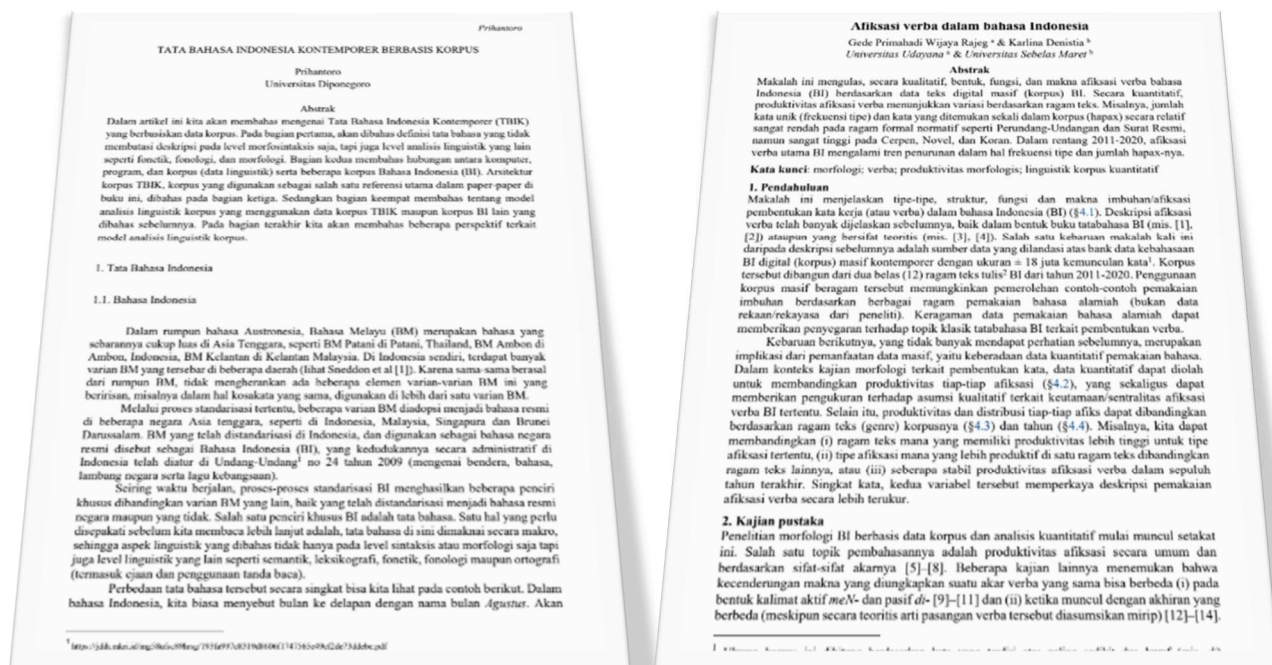
Laman EYD versi Daring dan Capaian Pengunjung

Terhitung 16 Agustus 2022, masyarakat dapat mengakses EYD versi daring melalui <https://ejaan.kemdikbud.go.id/>. Hingga Desember 2022, EYD versi daring telah diakses oleh 385 ribu pengguna dengan 6,2 juta kali pencarian dan lama akses rata-rata 3 menit 50 detik. Dari jumlah tersebut diketahui bahwa peminat EYD versi daring sangat tinggi karena penggunaannya yang mudah dan dapat diakses di mana saja.

Selain pemutakhiran EYD, tahun 2022, Tim Perkamusan dan Peristilahan juga dipercaya untuk Menyusun Tata Bahasa Indonesia Kontemporer (TBIK). TBIK merupakan kumpulan kaidah tentang bagaimana bahasa digunakan yang ditandai oleh karakteristik periode waktu saat ini. Tata Bahasa Indonesia Kontemporer (TBIK) merupakan tata bahasa Indonesia modern yang disusun berdasarkan data bahasa Indonesia pada masa kini yang ditemukan di lapangan dan yang lazim digunakan oleh para pemakai bahasa secara aktif. Penyusunan Tata Bahasa Kontemporer tahun ini berfokus pada topik morfologi dan melibatkan dua tim eksternal yang terbagi atas tim kontributor, yang bertugas menulis artikel, dan tim penyusun, yang bertugas mengelaborasi, menyunting, dan menelaah semua artikel tersebut ke dalam satu hasil telaah.

TBIK yang akan disusun ini berbasis data korpus. Dengan demikian, tata bahasa yang dihasilkan menjadi tata bahasa yang bersifat deskriptif. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra bekerja sama dengan para pakar di bidang tata bahasa dari berbagai instansi berupaya mewujudkan tata bahasa kontemporer.

Pada tahun 2023, Tim Tata Bahasa Kontemporer akan melakukan pengerjaan dua topik sekaligus secara simultan, yaitu topik morfologi dan topik sintaksis. Penulisan artikel dengan topik morfologi sudah dilakukan oleh tim kontributor pada tahun 2022 dan sudah diperiksa oleh tim penulis utama. Tahapan selanjutnya adalah seminar, penerbitan bunga rampai artikel morfologi, dan penulisan bab morfologi untuk buku Tata Bahasa Kontemporer oleh tim penulis.



Naskah TBIK

❖ PRODUK PENGEMBANGAN SASTRA

Indikator kinerja untuk produk pengembangan sastra adalah 32 film animasi yang dibuat tahun 2022, 32 film animasi dibuat berdasarkan legenda dari 30 provinsi di Indonesia. Sebanyak 32 film animasi di atas dapat diakses melalui tautan google drive.

Tim A	https://drive.google.com/drive/folders/1jt5z9hBlJfNz0jiP0WBPIXws12Wd9xuc
Tim B	https://drive.google.com/drive/folders/1_e30BmFar46Yqycx0nnE7ISfOrtKKNR7
Tim C	https://drive.google.com/drive/folders/1CmOR-taDkcTf5pS9uW4hYvO9hB1t-L-n?usp=sharing
Tim D	https://drive.google.com/drive/folders/1nv2fycucpeY7i0vJvAxwoKiJAaPrOrqc



Flyer/Poster Film Animasi

32 film animasi tersebut terwujud atas kolaborasi antara BPP Bahasa dengan Asosiasi Industri Animasi Indonesia (Ainaki), Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (MitrasDudi Dirjen Vokasi), dan Asosiasi Program Studi Desain Komunikasi Visual (Asprodi DKV). Ainaki selaku tim pakar bertanggung jawab atas pelaksanaan pembuatan 32 produk pemodernan sastra berupa film animasi yang dikerjakan oleh tim praktisi dan tim produksi. Tim Praktisi ditentukan berdasarkan kompetensi dan pengalaman yang dibuktikan melalui daftar riwayat hidup serta portofolio yang kemudian diseleksi oleh tim pakar dari AINAKI dan anggota KKLP Pelindungan dan Pemodernan Subkelompok Pemodernan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melalui rekrutmen terbuka. Tahapan seleksi mencakup seleksi administrasi dan wawancara. Sedangkan seleksi untuk tim produksi yang terdiri atas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) yang berada di bawah Mitrasdudi, serta universitas yang tergabung dalam Asosiasi Program Studi Desain Komunikasi Visual (Asprodi DKV) di seluruh wilayah Indonesia, dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Proses seleksi melibatkan pakar untuk menjamin kualitas tim yang terpilih. Sebagaimana seleksi tim praktisi, seleksi tim produksi terdiri atas dua tahap, yaitu seleksi administrasi dan wawancara bersama pakar.

Pembuatan produk pemodernan sastra menghasilkan 32 film animasi kegiatan pemodernan sastra dilaksanakan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Penyusunan Desain

Penyusunan desain dilaksanakan oleh anggota KKLK Pelindungan dan Pemodernan di Pusbanglin dan UPT Balai/Kantor Bahasa. Pada tahapan ini dilaksanakan konsultasi terkait arah kebijakan pemodernan sastra bersama pimpinan dan pakar terkait untuk menentukan tema, bentuk produk, sasaran dari produk pemodernan sastra. Pada tahapan ini juga akan menghasilkan dokumen pedoman, petunjuk teknis pemodernan sastra, dan dokumen pendukung lainnya.

I. Seleksi Legenda

Seleksi legenda untuk dijadikan film animasi dilakukan oleh anggota KKLK Pelindungan dan Pemodernan Pusbanglin dan Balai/Kantor Bahasa. Setiap Balai/ Kantor Bahasa diberikan kebebasan memilih karya sastra apa yang diangkat sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Balai/Kantor Bahasa dapat menentukan cerita rakyat (legenda) dari tempat Balai/Kantor Bahasa berasal dengan kriteria bahwa legenda yang diusulkan adalah sebuah cerita mengenai kearifan lokal yang merepresentasikan daerah dan belum banyak diangkat di industri kreatif, serta mengandung nilai penting yang edukatif, misalnya menguatkan karakter pelajar Pancasila (kebinekaan global). Balai/Kantor Bahasa juga mengumpulkan segala referensi yang terkait dengan cerita tersebut yang akan divisualisasikan oleh animator sebagai bahan lokakarya pertama.

II. Penjajakan kerja sama dengan Ainaki, MitrasDudi, dan Asprodi

Penjajakan kerja sama dengan Asosiasi Industri Animasi Indonesia (Ainaki), Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (MitrasDudi Direktorat Vokasi), dan Asosiasi Program Studi Desain Komunikasi Visual (Asprodi DKV).

III. Seleksi tim pakar, tim praktisi, dan tim produksi serta vendor audio

Seleksi tim pakar, tim praktisi, dan tim produksi serta vendor audio dilakukan oleh BPP Bahasa bersama Ainaki. Setelah tim pakar, tim praktisi, dan tim produksi serta vendor audio terbentuk kemudian dilakukan penyusunan Rencana Kerja Sama (RKS) untuk tim produksi dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk tim pakar, vendor audio, dan tim praktisi (terdiri atas sutradara, asisten sutradara, pengarah teknis, pengarah kreatif, penulis skenario, dan *storyboard artist*).

Pembuatan produk pemodernan sastra berupa film animasi dibagi ke dalam 4 tim besar, yaitu tim A, B, C, dan D. Setiap tim mengerjakan 8 judul film. Satu tim terdiri atas satu tim pakar, satu sutradara, satu asisten sutradara, satu pengarah teknis, satu pengarah kreatif, satu penulis skenario, dan satu *storyboard artist*.

2. Persiapan Seleksi Bahan Pemodernan Sastra (Lokakarya Pemodernan Sastra)

Persiapan seleksi bahan pemodernan sastra melalui Lokakarya Pemodernan Sastra dilakukan untuk finalisasi naskah legenda yang akan dijadikan film animasi serta untuk menghasilkan 3 dokumen awal untuk bahan pembuatan film animasi, yaitu dokumen *director's treatment*, *dokumen creative direction*, dan *dokumen technical direction*. (a) *dokumen director's treatment* mencakup *genre*, *premise/logline*, *concept*, *character description*, *setting*, dan *treatment*; (b) *dokumen creative*

direction mencakup visual direction, animation direction, dan audio direction; (c) dokumen technical direction mencakup technical assessment, resources assessment, dan technical direction. Untuk menghasilkan ketiga dokumen tersebut, tim pakar, tim praktisi, dan tim pemodernan sastra di pusat melakukan koordinasi dan konfirmasi ke tim pemodernan sastra di Balai dan Kantor Bahasa terkait legenda yang akan dijadikan ke dalam bentuk bentuk film animasi. Pada lokakarya ini juga dilakukan penandatanganan PKS oleh tim pakar dan tim praktisi.

3. Tahap Pra Produksi

Tahap praproduksi dilakukan oleh mahasiswa universitas penyelenggara pendidikan vokasi yang tergabung di bawah Asprodi di dalam pengawasan tim pakar dan tim praktisi.

4. Tahap Produksi

Tahap produksi dilakukan oleh siswa/mahasiswa SMK/PTV (Perguruan Tinggi Vokasi) yang tergabung di bawah Mitrasdudi Direktorat Vokasi di bawah pengawasan tim pakar dan tim praktisi.

5. Tahap Post Produksi

Tahap postproduksi dilakukan oleh siswa/mahasiswa SMK/PTV di dalam pengawasan tim pakar dan tim praktisi. Pada Tahap Postproduksi dilakukan kegiatan berikut.

I. Konsinyasi Finalisasi Produk Pemodernan Sastra

Konsinyasi Finalisasi Produk Pemodernan Sastra dilakukan untuk memastikan seluruh produk sesuai dengan rencana dan sasaran produk, baik secara substansi maupun secara visual.

II. Uji Publik (diseminasi) audiensi dalam rangka penyebarluasan Produk Pemodernan Sastra

Pada tahap postproduksi juga dilakukan uji publik untuk mendapatkan masukan dan reuiu dari masyarakat umum, audiensi dan diseminasi dalam rangka penyebarluasan Produk Pemodernan Sastra (IndonesianaTV, Kereta Api Indonesia (KAI), dan Garuda Indonesia).

6. Pelaporan

Setelah seluruh produk film animasi telah selesai sesuai dengan rencana dan target, baik secara substansi maupun secara visual kemudian dilakukan penyusunan laporan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan pembuatan film animasi yang sudah dilakukan.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kerja tahun 2022, antara lain:

1. Tingginya komitmen dan kerja sama tim dalam pelaksanaan program pada KKLP Kamus dan Peristilahan. Upaya mitigasi risiko juga terus dijalankan sehingga kendala dapat tertangani dengan baik. Hasilnya, target indikator kinerja tidak hanya tercapai, tetapi juga melebihi jumlah yang diharapkan.
2. Pembuatan produk pemodernan sastra berhasil dilaksanakan sesuai rencana salah satunya dipengaruhi oleh kolaborasi yang baik antara Pusbanglin (BPP Bahasa) dengan Ainaki, Asprodi, dan Mitrasdudi.
3. Komitmen yang kuat dari tim pemodernan sastra KKLP Pelindungan dan Pemodernan untuk melaksanakan pembuatan produk pemodernan sastra sampai selesai.
4. Dukungan dari pimpinan satker yang mendukung pelaksanaan pembuatan produk pemodernan sastra dari awal hingga selesai

Adapun hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target indikator kinerja antara lain:

HAMBATAN

Belum tersedianya sumber daya manusia dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai untuk menduduki posisi pengelola dan pengembang aplikasi-aplikasi pengembangan kosakata bahasa Indonesia, seperti aplikasi KBI daring, KBI luring, Korpus Indonesia, EYD Daring, dan SIPBI

Latar belakang pendidikan bahasa yang dimiliki oleh tim masih belum sesuai kebutuhan, misalnya saat ini belum ada staf yang berlatar belakang pendidikan bahasa Cina atau Jawa Kuno sehingga penyusunan etimologi kata serapan dari bahasa tersebut harus menggunakan bantuan pihak luar

Sebagai tim pengembangan bahasa yang bekerja dengan basis teknologi seperti mengolah data dalam KBI Daring, Aplikasi Kompilasi Kamus, Lexique Pro, dsb., saat ini belum didukung oleh perangkat komputer dengan spesifikasi yang memadai sehingga sistem kerja komputer berjalan sangat lambat dan waktu bekerja menjadi tidak efisien

Berkurangnya anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan. Misalnya pada kegiatan Sidang Komisi Istilah, kegiatan ini dilakukan tiga kali setahun, tetapi karena berkurangnya anggaran, tahun ini kegiatan tersebut hanya dilakukan dua kali setahun.

Ketidakpastian skema penganggaran pemodernan sastra (melalui tender atau belanja modal). Untuk memutuskan skema yang dipakai sangat menyita waktu sehingga proses produksi film animasi mundur sebulan dari waktu yang direncanakan

Keterbatasan anggaran karena biaya produksi animasi yang sangat tinggi (tidak sesuai dengan anggaran yang ada)

Kendala administrasi terkait finalisasi SK Pemodernan Sastra. SK belum bisa difinalkan karena sampai di akhir tahap produksi masih terdapat kekosongan/pergantian nama anggota pada beberapa tim produksi akibat ada beberapa sekolah yang mengundurkan diri dan alasan lainnya

Proses produksi sudah berjalan tetapi media penyimpan data daring belum tersedia

SMKA tidak kooperatif sehingga tim pasangan mereka, sehingga SMK B kesulitan melakukan komunikasi dan mengirimkan hasil kerja mereka

Sebagian siswa di Tim C kurang semangat melakukan produksi film animasi

Tim Praktisi kesulitan untuk mengupayakan film animasi selesai sesuai tenggat karena sebagian siswa masih dalam proses belajar dan hanya sebagian kecil siswa yang sudah profesional di bidang animasi

Terdapat kesalahan penulisan bahasa pada *credit title* film animasi

LANGKAH ANTISIPASI

1

Mengajukan permintaan tambahan SDM untuk posisi yang dibutuhkan, melanjutkan kontrak kerja tenaga teknis yang berkualifikasi dalam bidang linguistik, terutama terminologi dan leksikografi, dan mencari pengembang lepas yang memiliki kemampuan pembuatan sistem aplikasi

2

Bekerja sama dengan ahli bahasa yang mumpuni dalam penyusunan kamus etimologi

3

Memaksimalkan fasilitas perangkat komputer yang sudah ada dengan spesifikasi dan perangkat lunak yang memadai

4

Memaksimalkan waktu pelaksanaan kegiatan dan mengintensifkan diskusi dengan narasumber.

5

Melakukan koordinasi dengan Layanan Program dan Anggaran dan Layanan Umum EPP Bahasa terkait prosedur pengadaan produk pemodernan sastra

6

Melakukan audiensi untuk bekerjasama dengan Direktorat Vokasi dan Indonesia TV. Kerja sama dengan ANAKI dan Dirjen Vokasi (7 Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau PTV dan 83 SMK) untuk menentukan/merekrut Tim Praktisi dan Tim Produksi pembuatan 32 film animasi

7

Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Ainaki agar kekosongan tim produksi bisa segera diisi dan SK Tim Pemodernan Sastra bisa difinalkan

8

Tim mengusahakan media penyimpan sendiri dan biayanya di reimburse oleh Pusbanglin setelah revisi anggaran pemodernan sastra selesai

9

Melakukan koordinasi dengan Astrada dan Tim Pakar (AINAKI) terkait perubahan tim

10

Tim praktisi menjadwalkan rapat seminggu sekali dengan siswa dan mengunjungi beberapa tim produksi

11

Tim praktisi membuat tutorial penggunaan *tools editing* untuk dibagikan ke siswa serta tes *animatic* untuk meningkatkan kompetensi animasi siswa

12

Melakukan konsultasi dengan KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum serta KKLP Kamus dan Peristilahan melalui zoom untuk membahas penggunaan bahasa takarir dalam film animasi

Untuk mencapai target kinerja, baik tim perkamus dan peristilahan maupun tim pengembangan sastra melakukan beberapa upaya sebagai berikut:



Produk-produk pengembangan bahasa dan sastra berperan penting sebagai penyedia informasi, ilmu pengetahuan, serta rujukan. Melalui pemanfaatan produk kodifikasi, masyarakat dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami teks serta memproduksi teks sesuai bidang ilmu mereka. Kamus, tesaurus, ensiklopedia, dan korpus bahasa dapat menjadi media informasi yang dapat membantu masyarakat menambah kosakata dan pengetahuan yang mereka punya sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan keterbacaan mereka akan suatu teks. Peningkatan pemahaman dan keterbacaan akan suatu teks ditambah dengan pemanfaatan pedoman kebahasaan akan mampu meningkatkan produksi teks di masyarakat.

Melalui Kamus Bidang Ilmu, diharapkan para guru dan siswa di mana pun berada dapat saling berkomunikasi dalam istilah yang sama. Keseragaman istilah tersebut dimaksudkan untuk mencapai saling keterpahaman yang lebih tinggi di kalangan para pemangku kepentingan yang bergelut di bidang-bidang ilmu tertentu. Sudah lama dicita-citakan bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang dapat dengan jelas dan tepat mengemukakan makna-makna secara ilmiah. Penyusunan kamus bidang ilmu merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melalui Kamus Etimologi, masyarakat dapat melacak etimologi suatu kata, yakni asal-usul serta perubahan bentuk dan makna suatu kata. Dengan demikian masyarakat tidak hanya dapat mengetahui makna sebuah kata, tetapi juga asal-usulnya sehingga dapat menambahkan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam terhadap kata maupun bahasa.

Melalui Aplikasi Penyuntingan Ejaan Bahasa Indonesia (SIPEBI), ketersediaan bahan kebahasaan, di samping kamus, yang dapat digunakan secara praktis dan dapat dijangkau secara luas oleh pengguna bahasa Indonesia dapat terpenuhi. Bahan yang dimaksud berupa alat atau aplikasi yang dapat membantu pengguna bahasa untuk mengecek kesalahan berbahasa Indonesia, terutama dalam ragam tulis. Sebagai sebuah aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemutakhiran SIPEBI perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja aplikasi menjadi lebih akurat dan ramah pengguna serta pangkalan data yang semakin komprehensif. Dengan adanya pemutakhiran ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan publik terhadap produk kebahasaan.

Melalui Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD), masyarakat memiliki dasar untuk berbagai kebutuhan pengembangan produk bahasa seperti kamus dan glosarium, pembinaan kebahasaan masyarakat, penyusunan soal Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, dan berbagai kepentingan berbasis bahasa lainnya.

Melalui Tata Bahasa Kontemporer, masyarakat memiliki rujukan untuk memahami penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pembakuan bahasa Indonesia. Selain itu, diharapkan tata bahasa ini menjadi dokumentasi bahasa Indonesia sebagai salah satu upaya perlindungan bahasa Indonesia.

Melalui produk film animasi selain berdampak pada tersedianya produk pengembangan sastra tentunya terdapat juga manfaat yang mengiringinya, diantaranya:

1. masyarakat dapat mengetahui cerita rakyat (legenda) yang ada di seluruh Indonesia dengan pendekatan yang berbeda. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap sastra Indonesia terutama cerita-cerita rakyat yang ada di daerahnya masing-masing,
2. membentuk kolaborasi yang baik antara BPP Bahasa dengan unit utama Kemendikbudristek (Mitrasdudi), Asprodi, dan dunia industri (AINAKI).

2. Sasaran Kegiatan II

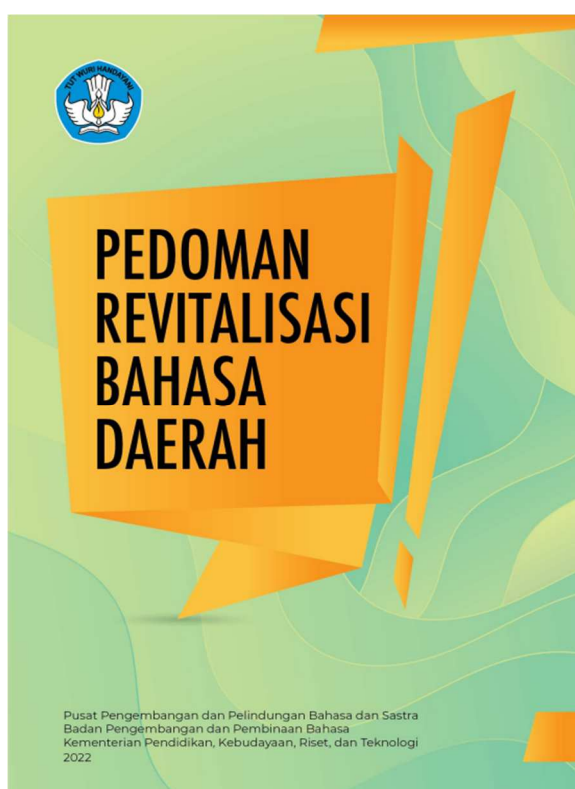
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melalui Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pelindungan dan Pemodernan telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka pelindungan bahasa dan sastra sebagai upaya untuk mempertahankan dan melindungi bahasa dan sastra agar tetap dipergunakan oleh masyarakat pemiliknya. Untuk mendukung ketercapaian sasaran berupa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra memiliki peran untuk menyusun model pelindungan bahasa dan sastra. Model ini akan dijadikan acuan oleh balai dan kantor bahasa sebagai pelaksana pelindungan bahasa dan sastra daerah. Pada tahun 2022 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra memiliki target sasaran sebanyak 6 model pelindungan yang terbagi menjadi 3 model pelindungan bahasa dan 3 model pelindungan sastra.

Pelindungan bahasa dan sastra daerah merupakan upaya menjaga bahasa dan sastra daerah agar tidak punah. Hal itu dilandasi pemahaman bahwa ketika sebuah bahasa dan sastra punah, dunia kehilangan warisan budaya yang tersimpan. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai aktivitas dilaksanakan dalam rangka melindungi bahasa dan sastra daerah, yaitu pemetaan bahasa, pengukuran daya hidup bahasa, konservasi bahasa, revitalisasi bahasa, registrasi bahasa, dan pada sastra yaitu penyusunan model, ujicoba model, diseminasi model, dan pendampingan implementasi model.

Dari berbagai aktivitas pelindungan bahasa daerah, prioritas dalam renstra periode ini diarahkan pada upaya menumbuhkan penutur muda melalui revitalisasi bahasa daerah dengan sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa daerah. Revitalisasi merupakan langkah strategis dalam rangka menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah kehidupan sehari-hari melalui cara yang menyenangkan. Revitalisasi juga merupakan upaya menjamin hak masyarakat adat untuk melestarikan dan mempromosikan bahasa mereka serta mengarusutamakan keragaman bahasa ke dalam semua agenda pembangunan.

Untuk mendukung ketercapaian sasaran berupa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra memiliki peran untuk menyusun model pelindungan bahasa dan sastra. Model ini akan dijadikan acuan oleh balai dan kantor bahasa sebagai pelaksana pelindungan bahasa dan sastra daerah.



Buku Pedoman Revitalisasi Bahasa Daerah

Indikator pendukung sasaran adalah sebagai berikut:

1. Bahasa Daerah Sasaran
2. Jumlah Penutur

3. Jumlah Guru Bahasa Daerah
4. Media
5. Publikasi.

Sasaran hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

1. Membangun ekosistem bahasa dan sastra daerah agar mampu menumbuhkan motivasi para pelakunya untuk lebih kreatif;
2. Menambah ranah penggunaan bahasa daerah dan juga menambah daya kreasi atas sastra daerah;
3. Mendorong partisipasi aktif dari pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas pendidikan, komunitas, serta individu pegiat dan penutur;
4. Melahirkan generasi-generasi penerus untuk mewarisi bahasa dan sastra daerah.

2.1. Indikator Kinerja Kegiatan II.I

Jumlah Model Pelindungan Bahasa dan Sastra

Tabel
Target dan Realisasi IKK
Jumlah Model Pelindungan Bahasa dan Sastra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Angka Dasar	Tahun 2022			Renstra				
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah	2.1	Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra daerah	0	6	6	100%	20	6	30%

Konsep yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai acuan kegiatan pelindungan bahasa dan sastra yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah maupun unit pelaksana teknis Kemendikbudristek di daerah. Model pelindungan bahasa dan sastra disusun sebagai standar pelaksanaan pelindungan di daerah agar sesuai dengan pedoman dan acuan yang telah disusun. Model pelindungan bahasa dan sastra dapat dilakukan melalui pendidikan, penggalan potensi-potensi bahasa dan sastra, pendataan, pendaftaran, pendokumentasian, pengaksaraan, publikasi, dan revitalisasi penggunaan bahasa dan sastra. Model pelindungan bahasa dan sastra tersebut diturunkan dari PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

Metode penghitungan indikator kinerja jumlah model pelindungan bahasa dan sastra adalah dengan menjumlahkan model-model pelindungan bahasa dan sastra yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun tertentu. Pada tahun 2022

indikator jumlah model perlindungan bahasa dan sastra di dukung oleh kegiatan dari RO(Rincian *Output*) model perlindungan bahasa dan model perlindungan sastra.

Realisasi IKK jumlah model perlindungan bahasa dan sastra 2022 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari target sebanyak 6 model telah terealisasi sebanyak 6 model dengan persentase capaian sebesar 100%. Model-model yang telah tersusun yaitu:

1. Pedoman Revitalisasi Bahasa Model A.
2. Pedoman Revitalisasi Bahasa Model B.
3. Pedoman Revitalisasi Bahasa Model C.
4. Pedoman Penyusunan Keekerabatan Sastra Lisan.
5. Pedoman Revitalisasi Sastra Lisan.
6. Petunjuk Teknis Konservasi Manuskrip.

Pada tahun awal renstra, indikator model perlindungan bahasa dan sastra belum memiliki nomenklatur dan merealisasikan target BPP Bahasa yaitu jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah yang kritis dan terancam punah dan jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah yang kritis dan terancam punah. Indikator Kinerja Kegiatan model perlindungan bahasa dan sastra baru di munculkan pada revisi Renstra BPP Bahasa 2020—2024. Indikator ini terdiri dari model yang berupa pedoman yang dihasilkan pada kegiatan model perlindungan bahasa dan model perlindungan sastra. Pada tahun 2021 jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah yang kritis dan terancam punah memiliki target 500 orang dan terealisasi sebanyak 600 orang atau 120% tercapai melebihi target. Untuk jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah yang kritis dan terancam punah memiliki target sebanyak 500 orang, namun hanya dapat terealisasi sebanyak 300 orang atau hanya 60% dari target terealisasi. Dalam mengidentifikasi capaian dan indikator keberhasilan dari Pusbanglin khususnya KKLP Pelindungan dan Pemodernan indikator jumlah penutur muda kurang tepat, indikator ini lebih tepat berada di balai/kantor bahasa. Supaya sasaran kegiatan dan indikator kinerja dapat lebih tepat dan sesuai maka Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mengusulkan perubahan Renstra BPP Bahasa 2020—2024. Pada tahun 2022 merupakan tahun awal dalam menghitung target indikator kinerja model perlindungan bahasa dan sastra.

Target akhir renstra revisi 2020—2024 untuk jumlah model perlindungan bahasa dan sastra adalah sebanyak 20 model. Sampai dengan tahun 2022 sudah terealisasi sebanyak 6 model perlindungan bahasa dan sastra.

Dalam merealisasikan target indikator kinerja jumlah model perlindungan bahasa dan sastra KKLP Pelindungan dan Pemodernan melakukan tugas dan fungsinya dengan dipayungi oleh rincian *output* model perlindungan bahasa dan model perlindungan sastra.

❖ **Model Pelindungan Bahasa**

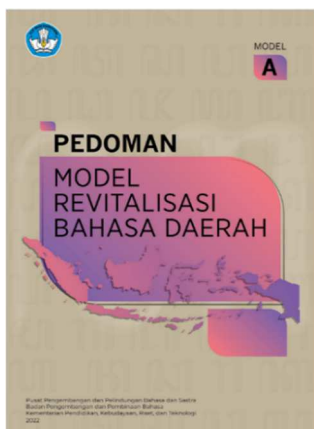
Prioritas dalam Renstra periode ini diarahkan pada upaya menambah penutur muda melalui revitalisasi bahasa daerah dengan sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

pelindungan bahasa daerah. Oleh karena itu, disusunlah model pelindungan bahasa yakni Revitalisasi Bahasa Model A, Revitalisasi Bahasa Model B, dan Revitalisasi Bahasa Model C. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pedoman yang menjadi acuan dan aturan dalam melaksanakan kegiatan. Tiga model revitalisasi masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri dalam praktiknya. Namun, ketiga model tersebut tetap mengacu pada empat prinsip dasar revitalisasi yaitu:

1. Dinamis, yakni berorientasi pada pengembangan bahasa daerah dan keperluan komunikasi, bukan sekedar memproteksi bahasa.
2. Adaptif dengan situasi lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun masyarakat tuturnya.
3. Regenerasi dengan fokus pada penutur muda di tingkat sekolah dasar dan menengah.
4. Merdeka berkreasi dalam penggunaan bahasanya.

Berikut ini adalah penjabaran singkat mengenai masing-masing pedoman revitalisasi bahasa daerah.

I. Pedoman Revitalisasi Bahasa Daerah Model A

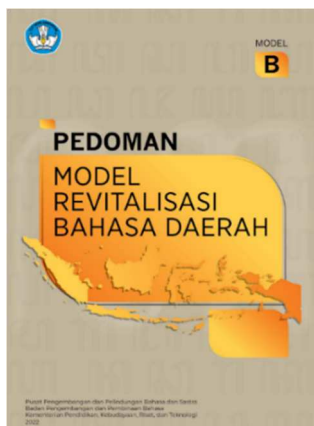


Revitalisasi bahasa model A diperuntukkan bagi bahasa daerah dengan karakteristik (1) daya hidup bahasanya aman atau rentan, (2) merupakan bahasa dominan di dalam masyarakat tuturnya, dan (3) mempunyai jumlah penutur yang besar. Untuk model A, revitalisasi dilakukan melalui pendekatan (1) pewarisan atau transmisi secara terstruktur dengan pembelajaran di sekolah (berbasis sekolah) atau pesantren dan (2) pembelajaran dilakukan secara integratif, kontekstual, dan adaptif, baik melalui muatan lokal maupun ekstrakurikuler.

Revitalisasi bahasa pada model A dilaksanakan dengan berbasis sekolah, melalui ranah pendidikan, baik sebagai muatan lokal maupun ekstrakurikuler. Mata pelajaran muatan lokal bahasa daerah memiliki kedudukan penting untuk memperkenalkan kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai landasan etnopedagogis. Pembelajaran bahasa daerah dapat dianggap sebagai gerbang untuk menanamkan dan mempertajam nilai-nilai karakter bangsa, melatih kepekaan berpikir, olah rasa, olah karsa, serta sarana menyalurkan gagasan dan imajinasi dalam berbagai kreativitas. Selain itu, diharapkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta pengalaman apresiasi dan ekspresi bahasa dan sastra, di samping meningkatkan kecerdasan logika dan retorika.

Peserta kegiatan revitalisasi model ini adalah siswa sekolah. Bentuknya dapat berupa perlombaan bahasa, sastra, dan aksara untuk Siswa SD dan SMP sebagai ajang evaluasi bagi para siswa yang telah mendapat pengajaran bahasa daerah di sekolahnya masing-masing. Harapannya, siswa SD dan SMP sebagai generasi muda dapat mencintai budaya sendiri dan dapat menggunakan bahasa ibunya dengan baik.

II. Pedoman Revitalisasi Bahasa Daerah Model B



Pedoman revitalisasi bahasa model B dikhususkan untuk bahasa-bahasa dengan ciri-ciri (1) daya hidup bahasa tergolong rentan, (2) jumlah penutur relatif banyak, dan (3) bahasa digunakan secara bersaing dengan bahasa-bahasa daerah lain di wilayah tersebut. Revitalisasi dapat dilakukan dengan pendekatan (1) pewarisan secara terstruktur melalui pembelajaran di sekolah (berbasis sekolah) jika wilayah tutur bahasa itu memadai atau (2) dilakukan melalui pembelajaran berbasis komunitas jika wilayah tutur bahasanya terbatas dan khas.

Dalam konteks bahasa dan sastra daerah Model B yang akan direvitalisasi pada tahun 2022 ini, kaum muda di wilayah-wilayah sasaran pada umumnya tidak dapat berkomunikasi lagi dalam bahasa daerah mereka. Mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia atau Melayu Tempatan (Ibrahim, 2020) sebagai alat komunikasi sehari-hari. Agar hasil revitalisasi ini efektif, kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam lingkungan sekolah saja, tetapi juga di luar lingkungan sekolah yang antara lain dapat melibatkan komunitas, antara lain orang tua, pemangku adat, penggerak bahasa, pelaku seni budaya, dan sebagainya.

III. Pedoman Revitalisasi Bahasa Daerah Model C



Pendekatan baru perlindungan bahasa di model C ditujukan untuk bahasa daerah dengan karakteristik daya hidup bahasa yang masuk dalam kategori mengalami kemunduran, terancam punah, atau kritis atau bahasa dengan jumlah penutur yang sedikit dan sebaran terbatas. Pada umumnya, ekologi bahasa-bahasa kecil ini tidak ada bahasa yang dominan. Pendekatan model C diterapkan melalui beberapa hal, yaitu pewarisan, pembelajaran, dan identifikasi *actor* atau pelaku. Pewarisan dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis komunitas untuk wilayah tutur bahasa yang terbatas dan khas. Pewarisan bahasa diharapkan dapat terjadi secara alamiah. Pembelajaran dilakukan dengan menunjuk dua atau lebih keluarga sebagai model tempat belajar atau dilakukan di pusat kegiatan masyarakat, seperti balai desa, tempat ibadah, kantor desa, atau taman bacaan masyarakat. Identifikasi aktor atau pelaku revitalisasi yang sudah ada di masyarakat penutur itu sendiri.

Pada hakikatnya, program revitalisasi untuk model C diprioritaskan untuk dua hal, yaitu perencanaan pemerolehan dan perencanaan prestise. Perencanaan pemerolehan ini berfokus pada ranah pendidikan, baik berbasis sekolah, komunitas, maupun di rumah dengan cara yang berbeda. Di sekolah, pemerolehan bahasa daerah ini direncanakan untuk dilakukan dengan menggunakan materi ajar yang sudah disusun untuk disampaikan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dengan demikian, untuk pendekatan ini diperlukan adanya analisis kebutuhan dan survei untuk ketersediaan SDM guru dan sarana sekolah yang cukup. Sementara itu, untuk pendekatan berbasis komunitas, juga dapat dilakukan hal serupa. Namun, hal ini harus diawali dengan analisis kebutuhan dan survei pendataan profil komunitas tutur yang ada di wilayah yang disasar. Kemudian, komunitas ini dijaring

dan diberi pembekalan agar mereka dapat membuat dan menyusun materi ajar sendiri atau paling tidak mengadakan kegiatan terkait kampanye penggunaan bahasa daerah.

Di sisi lain, untuk pendekatan berbasis keluarga/individu, lebih menitikberatkan pada penambahan ranah penggunaan bahasa daerah dan peningkatan kesadaran berbahasa daerah. Kemudian, pada perencanaan prestise, dapat dilakukan kampanye pengenalan bahasa dan sastra daerah di media sosial, seperti pembuatan sinjar dan pemberian penghargaan bagi pelaku atau pegiat bahasa daerah yang memiliki peran penting dalam pelestarian bahasa daerah. Dengan demikian, melalui kegiatan ini diharapkan agar penutur bahasa daerah itu dapat memperoleh kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa daerah mereka. Oleh karena itu, pada perencanaan prestise ini, lebih berfokus pada komunitas tutur dibandingkan pendidikan.

1. Uji Coba Model Pelindungan Bahasa

Badan Bahasa sejak tahun 2015 menggunakan model pengukuran daya hidup menggunakan kuesioner bentuk cetak sebagai instrumen. Untuk memudahkan pengumpulan data daya hidup bahasa, tahun 2022 dibuat sebuah aplikasi pengukuran daya hidup bahasa yang disebut VIBA App. Aplikasi ini merupakan alih wahana kuesioner cetak ke dalam bentuk aplikasi yang berbasis *paperless*. Dalam rangka menguji keefektifan dan keterandalan aplikasi tersebut dilakukan uji coba sebelum digunakan untuk pengukuran daya hidup bahasa daerah di Indonesia oleh balai/kantor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Kegiatan Uji Coba Model Pelindungan Bahasa ini bertujuan menguji fungsionalitas dari aplikasi pengukuran daya hidup bahasa sebagai model pelindungan di lapangan sehingga model dapat disebarluaskan ke balai/kantor bahasa dan masyarakat luas. Uji coba berfungsi untuk menguji keterandalan aplikasi dalam pengumpulan data daya hidup bahasa dan melakukan evaluasi terhadap kesalahan ataupun kekurangan aplikasi.

Keluaran Uji Coba Model Pelindungan Bahasa ini adalah laporan kegiatan dan evaluasi model yang menjadi pijakan untuk perbaikan model pelindungan yang akan digunakan oleh UPT (balai/kantor) dan masyarakat luas.

2. Diseminasi Pelindungan Bahasa

Berdasarkan resolusi A/RES/71/178, tentang hak-hak masyarakat adat, Majelis Umum PBB mencanangkan tahun 2019 sebagai Tahun Internasional Bahasa Daerah. Dalam resolusi ini memunculkan konsesus tentang pelestarian bahasa daerah secara berkelanjutan melibatkan negara anggota, masyarakat adat, masyarakat sipil, organisasi, akademisi, aktor publik dan swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam mendukung konsesus ini, Indonesia sebagai negara anggota yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengadakan program revitalisasi bahasa daerah. Pada tahun 2022 ini dimulai dengan mencanangkan tiga model revitalisasi bahasa, yaitu Model A, B, dan C. Ketiga model ini telah diterapkan di 13 provinsi di Indonesia.

Untuk menyebarluaskan hasil penyusunan dan penerapan model revitalisasi bahasa daerah, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mengadakan kegiatan Diseminasi

Model Pelindungan Bahasa. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah memberikan informasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, khususnya penyusunan model pelindungan bahasa, kepada masyarakat luas selaku pemilik anggaran.

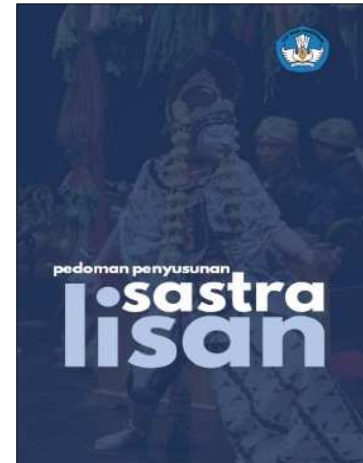
Kegiatan Diseminasi Model Pelindungan Bahasa ini dilaksanakan selama tiga hari yang dibagi menjadi tiga topik, yakni Diseminasi Merdeka Belajar: Revitalisasi Bahasa Daerah Model A, Diseminasi Merdeka Belajar: Revitalisasi Bahasa Daerah Model B, dan Diseminasi Merdeka Belajar: Revitalisasi Bahasa Daerah Model C. Narasumber dalam kegiatan Diseminasi Model Pelindungan Bahasa berasal dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Universitas Indonesia, UNIKA Atma Jaya, Universitas Pendidikan Indonesia, Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo, dan Kepala Dinas Provinsi Sumatra Utara.

❖ Model Pelindungan Sastra

Deskripsi dan keterangan terkait model pelindungan sastra yang disusun oleh KKLP Pelindungan dan Pemodernan, substansi Pelindungan Sastra pada tahun 2022, antara lain:

1. Model Penyusunan Keekerabatan Sastra Lisan

Pedoman Penyusunan Keekerabatan Sastra Lisan ini berisi tentang penyusunan analisis sintesis hubungan atau keterkaitan antara satu sastra dengan sastra lainnya, bahkan dapat menjadi rujukan model geobudaya yakni pengelompokkan budaya atau kebudayaan berdasarkan kegeografian. Pedoman ini juga berisi tentang konsep keekerabatan sastra, unsur-unsur dalam keekerabatan sastra, dan metodologi dalam menerapkan keekerabatan sastra.



2. Model Pedoman Revitalisasi Sastra Lisan

Pedoman Revitalisasi Sastra Lisan ini berisi tentang konsep dan unsur-unsur sastra lisan, model sastra lisan tipe A, B, dan C, indikator dan langkah kerja masing-masing model revitalisasi sastra lisan, petunjuk untuk melaksanakan pendampingan. Untuk mengetahui perbedaan dari masing-masing model revitalisasi A, B, dan C, berikut ini penjelasannya:



I. Revitalisasi Sastra Lisan Model A

Revitalisasi sastra lisan model A berfokus pada keberadaan maestro, pewaris, dan pelaku dalam keberlangsungan sastra lisan. Fokus utama revitalisasi model A atau bagi sastra lisan terancam punah adalah maestro. Maestro sastra lisan adalah pelaku dan tokoh yang mempunyai keahlian mumpuni, mewarisi keahlian maestro generasi sebelumnya, dan mewariskan keahliannya kepada generasi berikutnya. Selain itu, maestro juga mendapatkan pengakuan masyarakat pendukungnya. Kemaestroannya dilihat berdasarkan kemampuannya mempertunjukkan sastra lisan yang berumur minimal dua generasi. Penilaian seseorang sebagai maestro ditentukan oleh pengakuan masyarakat, peneliti, narasumber, dan lembaga yang kompeten. Selain hal tersebut, penilaian ditentukan melalui pengalaman yang berkesinambungan dalam menekuni sastra lisan selama minimal 25 tahun.

II. Revitalisasi Sastra Lisan Model B

Revitalisasi sastra lisan model B berfokus pada kondisi sastra lisan. Karya sastra lisan yang dimaksudkan dilihat dari bentuk, isi, dan fungsi. Karakteristik dari sudut bentuk adalah tuturan, gerak, bunyi, dan ritual. Karakteristik dari sudut isi adalah cerita dan noncerita. Karakteristik dari sudut fungsi antara lain adalah konformitas kebudayaan, identitas, alat paedagogik, hiburan, dan sebagainya.

Hal-hal yang menjadi pendukung pertunjukkan juga rumpang harus dilengkapi keberadaannya, termasuk di dalamnya adalah bahasa yang digunakan. Pada proses revitalisasi ini yang perlu dikuatkan adalah keberadaan karya sastra lisan tersebut dalam masyarakat pendukungnya. Dalam kaitan ini, formula sastra lisan menjadi acuan dalam revitalisasi.

III. Revitalisasi Sastra Lisan Model C

Revitalisasi sastra lisan model C berfokus pada pementasan, komunitas, dan pemangku kepentingan dalam situasi sastra itu sedang berkembang. Hal ini ditandai dengan maestro, pewaris, dan pelaku dalam segi kuantitas dan kualitas masih memadai dan keberadaan karya sastra itu dapat dikatakan masih utuh.

Meskipun kondisi maestro, pewaris, pelaku dan karya sastra memadai, pementasan, komunitas, dan pemangku kepentingan perlu dikuatkan keberadaannya. Pementasan sastra lisan diupayakan berlangsung sesuai dengan konteksnya dan membuat sedekat mungkin dengan audiens. Bila diperlukan disiapkan media baru, bantuan takarir (caption), buku program pertunjukan, dan hal lain sebagai sarana pendukung.

Komunitas yang memiliki apresiasi tinggi memungkinkan sastra lisan tetap menjadi living tradition sebagai bagian dari kehidupan mereka. Akan tetapi, persoalan sosial ekonomi dan politik menjadi penyebab sastra lisan ini tidak dapat dipertunjukkan.

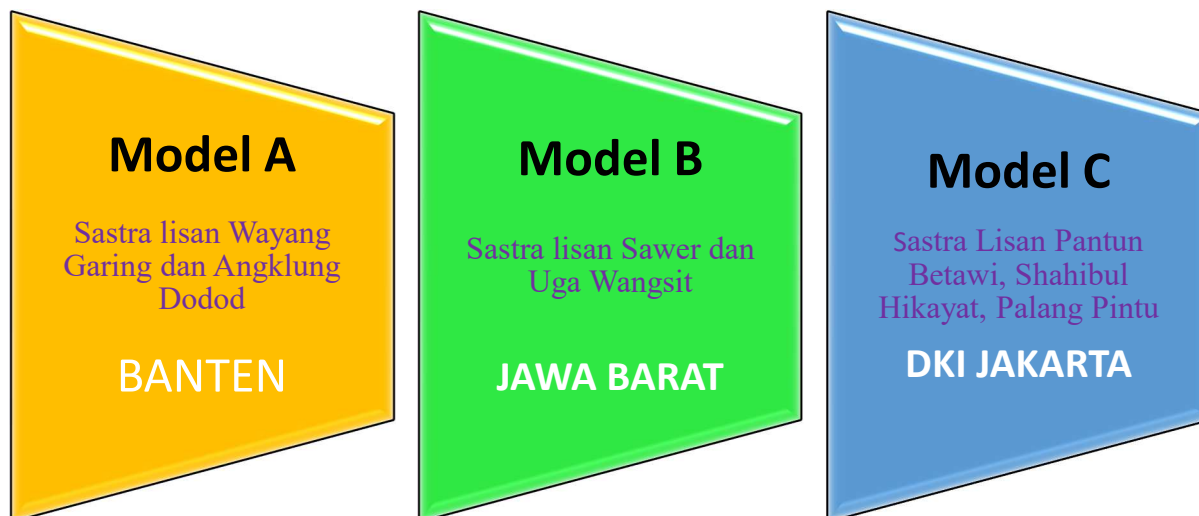
Pemangku kepentingan dapat memberikan stimulan bagi masyarakat atau unit lembaga lain, baik swasta maupun pemerintah untuk kembali memanfaatkan sastra lisan tersebut dalam berbagai program mereka.

Model Pelindungan Sastra untuk Pedoman Penyusunan Kekerabatan Sastra Lisan telah diujicobakan di 4 daerah, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Kekerabatan sastra yang menjadi acuan pada uji coba tersebut adalah sastra lisan macapat.



Dokumentasi Macapat dalam rangka Uji Coba Kekerabatan Sastra Lisan Macapat di Cirebon, Jawa Barat

Model Pelindungan Sastra untuk revitalisasi sastra lisan telah diujicobakan di 3 daerah, yaitu Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Uji coba pedoman revitalisasi sastra lisan menggunakan model revitalisasi sastra yang berbeda di tiap daerah yang diujicobakan.



IV. Model Petunjuk Teknis Konservasi Manuskrip



Model Petunjuk Teknis Konservasi Manuskrip berisi tentang prosedur kerja dalam mengonservasi manuskrip, alat-alat yang digunakan dalam konservasi, mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan melakukan katalogisasi manuskrip.

Dalam melaksanakan program kerja tersebut, tim dari substansi Pelindungan Sastra melakukan beberapa kegiatan di antaranya rapat yang dilaksanakan secara daring bersama dengan pakar dan narasumber, konsinyasi penyusunan model Pelindungan Sastra, Uji Coba Model Pelindungan Sastra, dan pendampingan implementasi pelindungan sastra dari Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra kepada Balai/Kantor Bahasa yang melaksanakan kegiatan revitalisasi sastra lisan di daerah.

Setelah melakukan penyusunan model Pedoman Kekerabatan Sastra, selanjutnya dilakukan uji coba Pedoman Kekerabatan Sastra Lisan di empat daerah, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Selain itu, pedoman revitalisasi sastra lisan yang telah disusun juga diujicobakan di tiga daerah, yaitu Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra membentuk tim yang terdiri dari anggota substansi Pelindungan Sastra yang bertugas sebagai pendamping implementasi model pelindungan sastra yang dilaksanakan oleh anggota KKLK Pelindungan dan Pemodernan di Balai/Kantor Bahasa.



Pendampingan Implementasi Model Pelindungan Sastra
Di Nusa Tenggara Barat, Riau, dan Gorontalo

Keberhasilan indikator kinerja dilihat pada faktor-faktor berikut ini.

1. Ketersediaan data dan informasi mengenai bahasa dan sastra daerah (termasuk sastra lisan dan sastra tulis) yang masih difungsikan;
2. ketersediaan data dan informasi mengenai pelaku/pegiat bahasa dan sastra daerah dalam kegiatan tradisional;
3. ketersediaan data dan informasi mengenai sarana dan prasarana bidang bahasa dan sastra daerah;
4. ketersediaan data dan dokumentasi bahasa, seperti kamus, tata bahasa, daftar kata, serta kajian-kajian tentang bahasa tersebut, serta ketersediaan data dan dokumentasi sastra daerah, seperti publikasi ataupun rekaman;
5. ketersediaan data dan informasi mengenai bahasa dan sastra daerah yang sudah tidak lagi difungsikan;
6. ketersediaan data dan informasi tradisional bahasa dan sastra daerah yang sudah berubah fungsinya;
7. ketersediaan data dan informasi mengenai bahasa dan sastra daerah yang dijadikan bahan ajar di sekolah-sekolah; dan
8. ketersediaan data dan informasi ekosistem bahasa dan sastra daerah yang masih ada.

Penyusunan model perlindungan bahasa dan sastra memiliki berbagai hambatan antara lain hambatan terkait konsep, narasumber, serta waktu pengerjaan dan anggaran. Berikut penjabaran dari setiap kendala dan langkah antisipasinya

HAMBATAN

Konsep model perlindungan bahasa adalah konsep yang baru di perlindungan bahasa sehingga staf perlindungan bahasa memerlukan cukup waktu untuk menentukan turunan pedoman model perlindungan bahasa

Narasumber belum memahami peta jalan model perlindungan bahasa sehingga sulit untuk menyatukan pemahaman dan konsep yang sama antarpakar mengenai pedoman yang disusun

Terbatasnya waktu penyusunan pedoman model perlindungan bahasa dan sastra dan terbatasnya anggaran Pusbanglin untuk penyiapan bahan model perlindungan bahasa dan sastra membuat ruang gerak penyusun menjadi terbatas

Kurangnya perhatian dari pemangku kebijakan di Badan Bahasa terkait upaya perlindungan sastra dengan keterlibatan masyarakat atau pemerintah daerah secara menyeluruh dalam revitalisasi sastra lisan dan proses pewarisan sastra lisan kepada generasi muda

Kurang optimalnya uji coba model perlindungan sastra untuk diterapkan ke masyarakat karena keterbatasan anggaran yang tersedia

Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam hal perlindungan sastra karena belum mendapatkan sertifikasi atau pengakuan atas keahlian yang dimiliki dalam hal perlindungan sastra

LANGKAH ANTISIPASI

1

Memperbanyak kajian pustaka terkait konsep dan mengenai turunan pedoman model perlindungan bahasa. Selain itu, dilakukan pula koordinasi yang lebih intensif dengan 12 UPT pelaksana Revitalisasi Bahasa Daerah

2

Berdiskusi secara intensif antara tim perlindungan bahasa dengan para narasumber dan membuat jadwal pertemuan tiap pekan di hari yang sama sehingga narasumber dan staf Pelindungan Bahasa dapat berdiskusi bersama

3

Memaksimalkan kinerja staf perlindungan bahasa dan sastra untuk penyusunan pedoman. Selain itu juga dibuat pembagian tim penyuntingan di antara staf perlindungan bahasa dan sastra

4

Pelibatan pemangku kebijakan dalam setiap tahapan perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan

5

Memaksimalkan proses uji coba model perlindungan sastra ke masyarakat agar pedoman yang telah disusun menjadi tepat sasaran untuk upaya perlindungan sastra, baik dari sastra lisannya, maestro atau pelaku sastra lisan, dan komunitas sastra yang ada di daerah

6

Mengupayakan pelatihan atau bimbingan teknis bagi pelaksana yang akan melaksanakan kegiatan perlindungan sastra

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja jumlah model perlindungan bahasa dan sastra adalah:



Dalam menyusun sebuah rekomendasi untuk penyusunan model perlindungan bahasa dan sastra, diperlukan perhatian pada sejumlah aspek mengenai luaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*), serta ukuran kinerja bagi setiap aspek tersebut. Dalam hal hasil (*outcome*) dapat dilihat pada capaian jangka menengah seperti berikut ini.

1. Tersedianya data dan informasi mengenai dukungan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah;
2. Tersedianya data dan informasi mengenai dukungan dari komunitas bahasa itu sendiri dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah;
3. Tersedianya data dan informasi mengenai dukungan sektor swasta dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah;
4. Tersedianya data dan informasi mengenai dukungan media dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah;
5. Tersedianya data dan informasi mengenai dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah, serta
6. Tersedianya data dan informasi mengenai dukungan sektor pendidikan dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah.

3. Sasaran Kegiatan III

Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama dalam pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat memengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Upaya perbaikan tata kelola pemerintah dilakukan dengan mencari paradigma terbaik yang dapat dipraktikkan di lapangan. Secara umum, Indonesia mengarah pada praktik paradigma *new public management*, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, serta *new public service (governance)* yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media masa.

Hasil yang diharapkan dari penciptaan tata kelola yang baik melalui reformasi birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan tersebut yaitu dengan cara peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja anggaran atas pelaksanaan anggaran.

3.1. Indikator Kinerja Kegiatan III.1

Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tabel
Target dan Realisasi IKK Predikat SAKIP
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Angka Dasar	Tahun 2022			Renstra		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
3 Meningkatkan tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	3.1 Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	BB	BB	A	120%	BB	A	120%

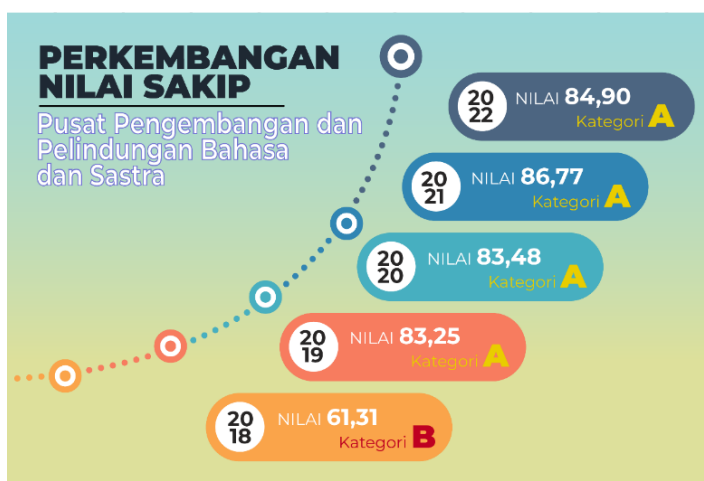
Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Target nilai SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dapat tercapai, bahkan melampaui target. Ketercapaian nilai/predikat SAKIP ini ditunjang oleh beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu:

1. Pembahasan draf revisi Renstra Badan Bahasa Tahun 2020—2024 dengan memperhatikan permasalahan pada Renstra terdahulu serta penyederhanaan sasaran dan indikator sesuai dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran;
2. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;
3. Penyusunan perjanjian kinerja Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Kasubbag Tata Usaha, dan koordinator KKLP;
4. Tindak lanjut Lembar Hasil Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya;
5. Penyusunan SOP pelaporan kinerja dan SOP penyusunan laporan kinerja disertai dengan kegiatan sosialisasi beserta implementasinya;
6. Pengukuran kinerja yang dilakukan, baik setiap bulan maupun triwulan; dan
7. Penyusunan laporan kinerja.



Hal-hal yang menjadi kendala dalam ketercapaian predikat SAKIP, yaitu kurangnya pemahaman dan perhatian akan pentingnya implementasi SAKIP sebagai instrument evaluasi pada suatu instansi, dan pemahaman subyektif auditor terkait butir evaluasi pada saat penilaian SAKIP.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dilakukan beberapa langkah antisipatif, yang meliputi peningkatan komunikasi dan koordinasi, baik di lingkungan internal maupun koordinasi dengan pihak eksternal, seperti Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Biro Perencanaan, Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Jenderal Anggaran, dan instansi terkait lainnya. Keikutsertaan staf dalam bimbingan SAKIP yang dilakukan oleh Pusdiklat dan Biro Perencanaan Kemdikbud pun menjadi salah satu upaya dalam rangka mengatasi kendala-kendala tersebut. Selain itu, upaya sosialisasi mengenai pentingnya implementasi SAKIP pun dilakukan kepada internal Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Di samping itu, pengisian dokumen SAKIP dalam aplikasi terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal diupayakan agar dapat diisi sesuai periode waktu pengisiannya pada laman SPASIKITA Kemdikbudristek.

The screenshot shows the SPASIKITA application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and the name 'SPASIKITA'. Below it, there is a header for the organization: '[419007] PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA'. The main area displays a table titled 'REKAPITULASI RIWAYAT PELAPORAN SMART RINCIAN OUTPUT'. The table has columns for 'KODE PROJEK', 'RINCIAN OUTPUT (RO)', 'SATUAN', 'VOLUME', 'JANGKA WAKTU' (with sub-columns for 'TARGET', 'CAPAIAN', and 'PROGRESS'), 'KETERANGAN', 'BENTUK LAPORAN' (with sub-columns for 'TANGGAL' and 'WAKTU'), and 'STATUS'. There are six rows of data, each representing a different project and its output.

KODE PROJEK	RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	VOLUME	JANGKA WAKTU			KETERANGAN	BENTUK LAPORAN		STATUS
				TARGET	CAPAIAN	PROGRESS		TANGGAL	WAKTU	
DA.419007.2021.00A	0010	Profil	1000	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> Status Pelaksanaan: DIPA No. 12 Burek Kategori Pelaksanaan: Kegiatan Kegiatan belum berjalan dan masih dalam tahap persiapan awal Kendala/Permasalahan: Tidak Ada Tanggal Adu Masalah: - Kategori Kendala/Permasalahan: - Tidak ada kendala atau permasalahan 	28-04-2022	14:17:48	Data Berhasil Terekam (Sukses)
DA.419007.2021.00A	0020	Bahan	3	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> Status Pelaksanaan: DIPA No. 12 Burek Kategori Pelaksanaan: Kegiatan Kegiatan belum berjalan dan masih dalam tahap persiapan Kendala/Permasalahan: Tidak Ada Tanggal Adu Masalah: - Kategori Kendala/Permasalahan: - Tidak ada kendala atau permasalahan 	28-04-2022	14:17:29	Data Berhasil Terekam (Sukses)
DA.419007.2021.00C	0010	Mulai	3	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> Status Pelaksanaan: DIPA No. 12 Burek Kategori Pelaksanaan: Kegiatan Kegiatan belum berjalan dan masih dalam tahap persiapan Kendala/Permasalahan: Tidak Ada Tanggal Adu Masalah: - Kategori Kendala/Permasalahan: - Tidak ada kendala atau permasalahan 	28-04-2022	14:18:24	Data Berhasil Terekam (Sukses)
DA.419007.2021.00C	0020	Mulai	3	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> Status Pelaksanaan: DIPA No. 12 Burek Kategori Pelaksanaan: Kegiatan Kegiatan belum berjalan dan masih dalam tahap persiapan Kendala/Permasalahan: Tidak Ada Tanggal Adu Masalah: - Kategori Kendala/Permasalahan: - Tidak ada kendala atau permasalahan 	28-04-2022	14:18:23	Data Berhasil Terekam (Sukses)
WA.419007.2021.00A	0010	Lembaran	12	1	1	8.33	<ul style="list-style-type: none"> Status Pelaksanaan: Rencana Kategori Pelaksanaan: - Sudah dibekukan sesuai hasil koordinasi, menunggu administrasi foto untuk Kendala/Permasalahan: - Tanggal Adu Masalah: - Kategori Kendala/Permasalahan: - Tidak ada kendala atau permasalahan 	28-04-2022	14:18:05	Data Berhasil Terekam (Sukses)
WA.419007.2021.00A	0040	Lembaran	12	1	1	8.33	<ul style="list-style-type: none"> Status Pelaksanaan: Rencana Kategori Pelaksanaan: - Sudah dibekukan berdasarkan hasil koordinasi dengan katibagang sebagai Subdit Pelaksana dan penanggung jawab SPASIKITA Subdit Sastra Kendala/Permasalahan: - Tanggal Adu Masalah: - Kategori Kendala/Permasalahan: - Tidak ada kendala atau permasalahan 	28-04-2022	14:18:05	Data Berhasil Terekam (Sukses)

Partisipasi pada pengisian aplikasi SPASIKITA

Beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target predikat SAKIP satker yaitu:

1. mengevaluasi kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra secara holistik dan komprehensif setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan.
2. melakukan sosialisasi dan implementasi SAKIP kepada seluruh pegawai dan pimpinan di Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra;
3. melengkapi butir-butir penilaian SAKIP sesuai dengan peraturan terbaru; dan
4. membentuk tim penyusunan SAKIP.

3.2. Indikator Kinerja Kegiatan III.II

Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Tabel
Target dan Realisasi IKK
Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

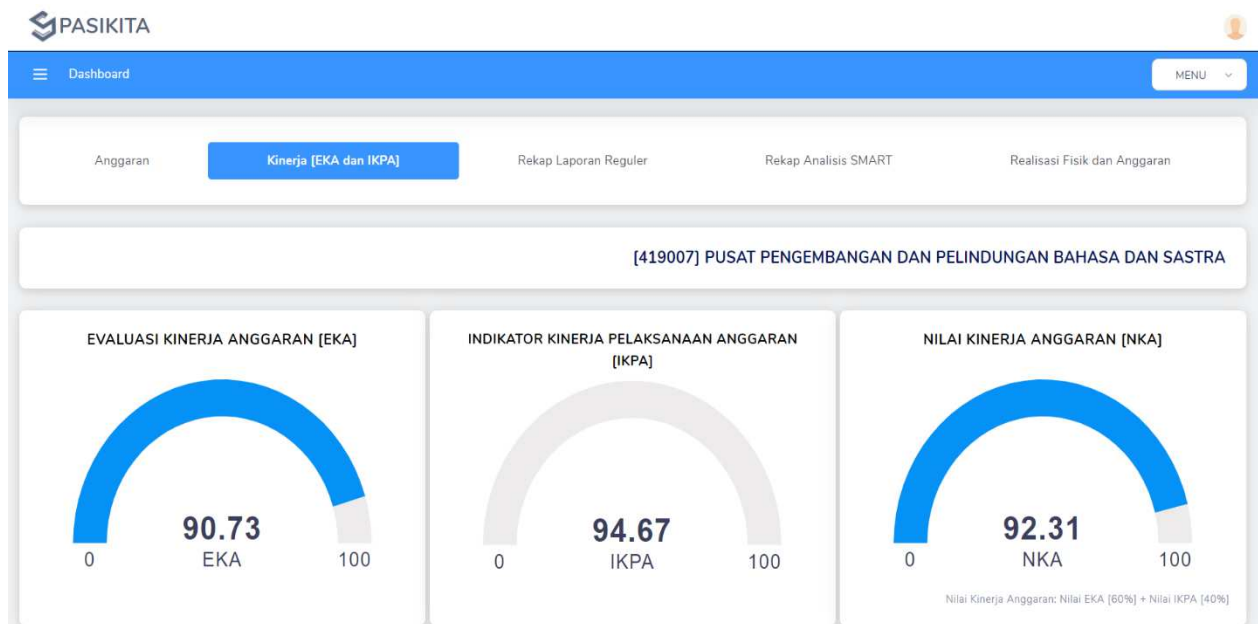
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Angka Dasar	Tahun 2022			Renstra		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
3 Meningkatkan tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	3.2 Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	91	91	92,31	101,44%	91	92,31	101,44%

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

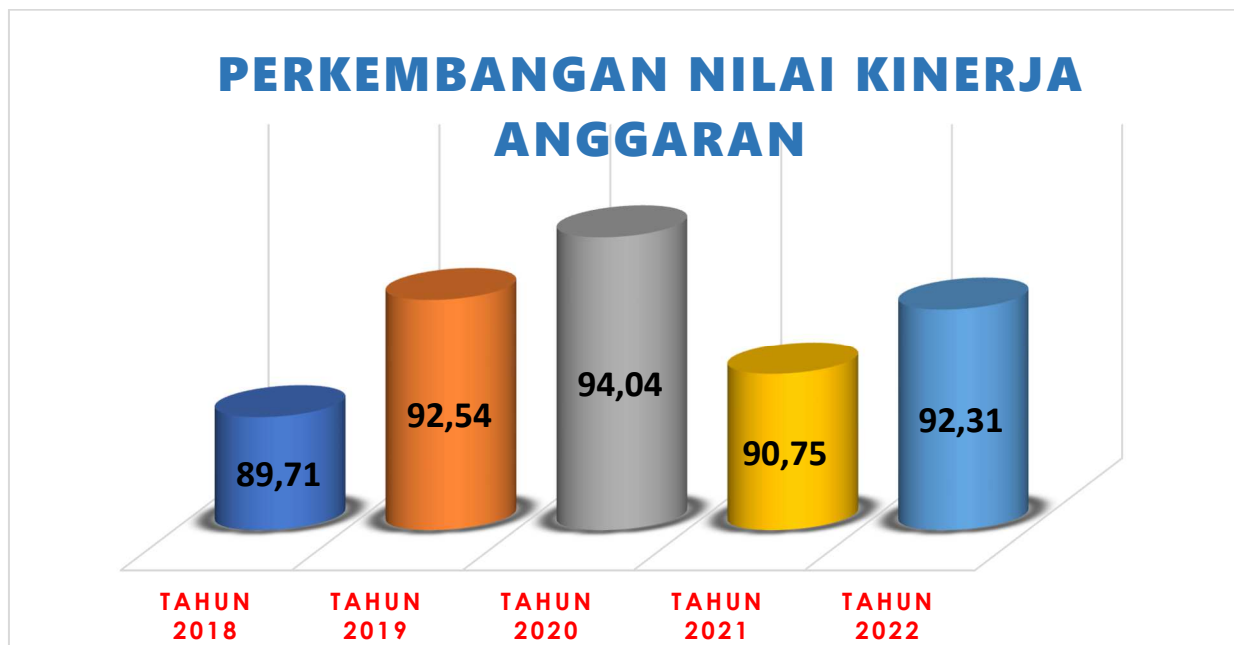
Dalam menghitung nilai kinerja anggaran menggunakan metode penghitungan sebagai berikut:
 $NKA = \text{Nilai EKA} [60\%] + \text{Nilai IKPA} [40\%]$

Dimana nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) terdiri atas: penyerapan anggaran, konsistensi, capaian *output*, efisiensi, dan nilai efisiensi sedangkan nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) terdiri atas:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran(revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA).
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran(penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan dispensasi SPM).
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran(capaian *output*).



Nilai Kinerja Anggaran pada aplikasi SPASIKITA



Hambatan dan permasalahan yang memengaruhi tercapainya target nilai kinerja anggaran yaitu:

1. Jadwal yang tidak proporsional dan inkonsistensi pelaksanaan jadwal kegiatan oleh tim; dan
2. Kegiatan dan realisasi anggaran baru terealisasi seluruhnya pada akhir tahun.

Langkah-langkah antisipatif yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu dengan cara:

1. Mengevaluasi dan mengatur ulang sisa jadwal kegiatan dan peneguran terhadap coordinator kegiatan oleh pimpinan;
2. Pimpinan telah menegur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan agar realisasi *output* berjalan sesuai rencana dan tidak menumpuk di akhir tahun.

Strategi yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dalam meningkatkan pencapaian target kinerja nilai kinerja anggaran yaitu:

1. Meminimalkan deviasi rencana penarikan anggaran dengan memantapkan jadwal pelaksanaan kegiatan serta penyiapan tim keuangan yang tangguh;
2. Penguatan tata kelola keuangan terkait pertanggung jawaban keuangan yang tertib dan lancar disertai dengan peningkatan kompetensi bagi pengelola keuangan; dan
3. Pemetaan kegiatan yang menyeluruh dalam rangka menyiapkan data yang valid dan handal bagi pimpinan dalam menentukan/mengambil kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan/anggaran.

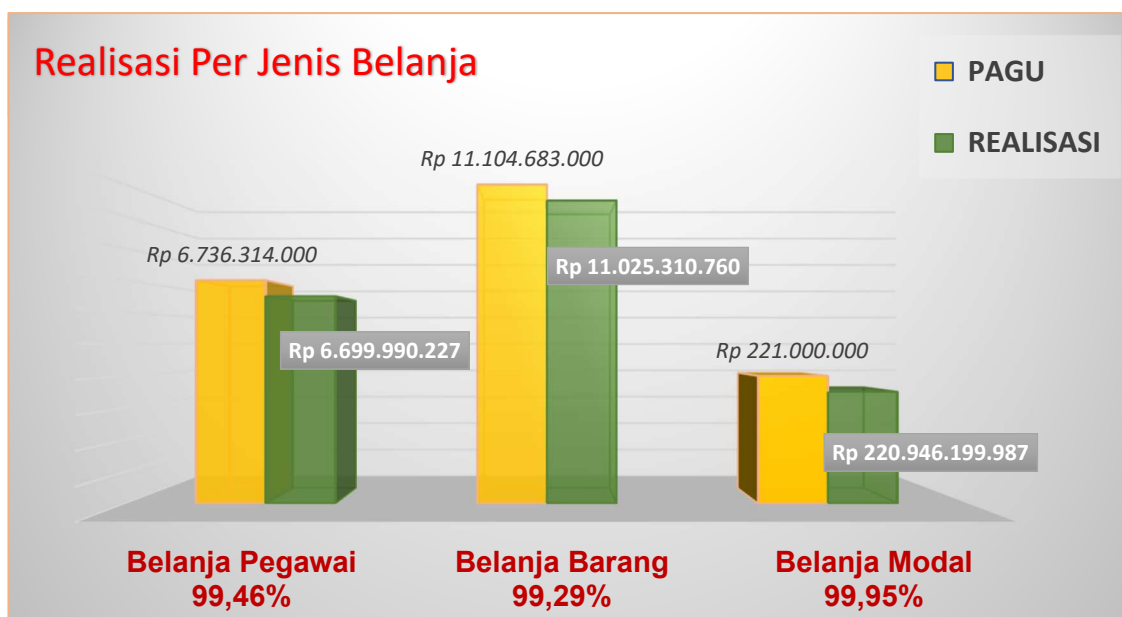
❖ Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dalam DIPA awal tahun 2022 adalah sebesar Rp19.950.192.000,00. Pusbanglin mengalami dua kali revisi pagu, hingga pagu anggaran terakhir menjadi Rp18.061.997.000,00.



Dari pagu anggaran terakhir tersebut, berhasil direalisasikan sebesar Rp17.946.199.987,00 (data SP2D SAKTI) dengan persentase daya serap sebesar 99,36%. Pagu tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian tiga sasaran kegiatan dengan 4 indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.



Tabel
Penyerapan Anggaran Setiap IKK

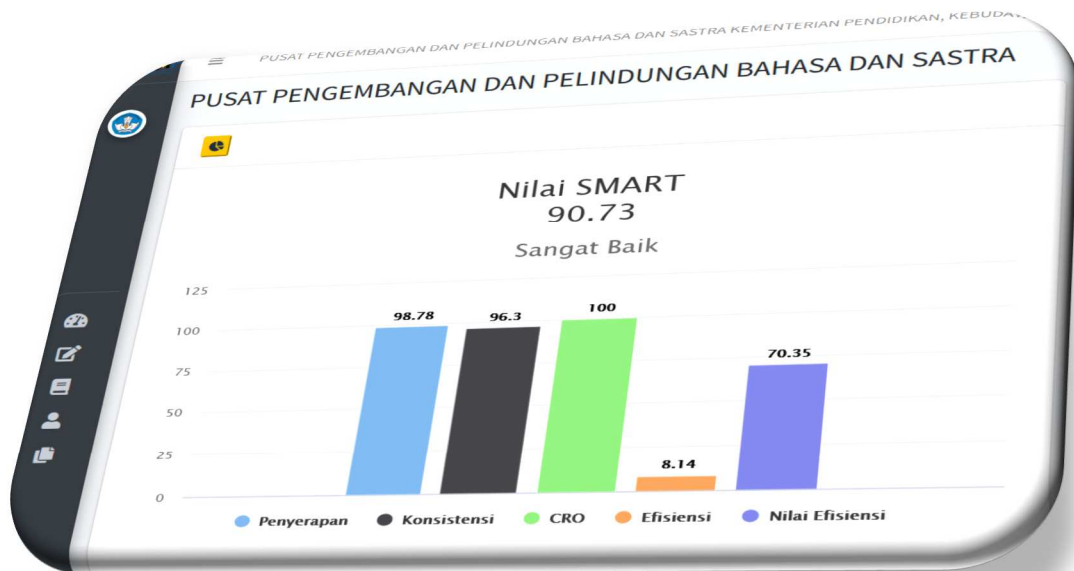
Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Daya Serap
1	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	1.1	[IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	6.399.380.000	6.356.988.694	99,34%
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	2.1	[IKK 2.1] Jumlah model perlindungan bahasa dan sastra daerah	1.774.132.000	1.757.241.235	99,05%
3	Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	3.1	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	1.440.375.000	1.436.788.877	99,75%
		3.2	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	8.448.110.000	8.395.181.181	99,37%

2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2022, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 8,14% atau Rp1.470.246.556,00 dari pagu anggaran sebesar Rp18.061.997.000,00 dengan capaian rata-rata IKK sebesar 106,25% dari 4 IKK. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari:

1. Penghematan belanja barang;
2. Optimalisasi kegiatan perjalanan dinas dan kegiatan paket *meeting*; dan
3. Strategi pelaksanaan kegiatan *hybrid*(luring dan daring).

Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk melaksanakan penambahan realisasi target IKK, salahsatunya yaitu pada IKK jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra.



Berikut adalah ringkasan dari tiga IKK yang memiliki capaian melebihi target. Dengan memaksimalkan strategi/inovasi yang sudah tersebut diatas Pusbanglin mampu mengoptimalkan keterbatasan anggaran untuk merealisasikan target melebihi dari target capaian yang sudah ditentukan.

No.	Indikator Kinerja kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi	Volume target	Realisasi
1	Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	7.501.597.000	6.399.380.000	6.356.988.694	7	10
2	Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	1.583.158.000	1.440.375.000	1.436.788.877	BB	A
3	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	9.091.305.000	8.448.110.000	8.395.181.181	91	92,31

B. INOVASI, PENGHARGAAN, DAN PROGRAM *CROSSCUTTING/COLLABORATIVE*

1. Inovasi

Pada tahun 2022, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melakukan inovasi sebagai berikut.

I. Kamus Masuk Sekolah (KMS)

Tahun 2022, Tim Perkamusan dan Peristilahan berhasil melaksanakan tahapan uji coba Kamus Masuk Sekolah. Kegiatan ini merupakan program baru yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengenalkan kemahiran merujuk (*reference skill*) kepada siswa, mulai dari tingkat dasar sampai dengan menengah. Tahapan uji coba ini dilaksanakan secara tatap muka di enam sekolah di Jakarta, mulai dari jenjang sekolah dasar sampai jenjang sekolah menengah atas, di kantor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Sentul, Kabupaten Bogor, dan di Kalimantan Selatan.



Pelaksanaan KMS di SMP N 35 Jakarta

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah pengenalan produk-produk leksikografi seperti kamus, tesaurus, glosarium, dan ensiklopedia, baik cetak maupun daring. Siswa juga dilatih untuk mencari makna dalam kamus cetak dengan cepat dan sistematis. Untuk tingkat sekolah menengah atas/kejuruan, materi ditambah dengan pembuatan akun pengguna terdaftar KBBI Daring. Pembelajaran dilaksanakan baik melalui teori maupun praktik, dengan kegiatan kelas yang menarik.

II. Kata Tahun Ini

Menjelang akhir tahun 2022, Tim Perkamusan dan Peristilahan menyiapkan bahan pemilihan Kata Tahun ini (KTI). Sejak tahun 2019 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan satu kata yang populer dalam bahasa Indonesia untuk dijadikan KTI. KTI yang telah ditetapkan sebelumnya adalah milenial (2019), pandemi (2020), dan vaksin (2021). Penetapan KTI didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu daftar kata terpopuler menurut KBBI, frekuensi kemunculan di Google Trends, penanda berbagai peristiwa, penggunaan kata itu di berbagai kalangan, dan keluasan distribusi kata tersebut.



Berita Media Terkait KTI 2022

Tahun ini, Badan Bahasa menetapkan kata metamesta sebagai KTI tahun 2022. Metamesta merupakan padanan dari metaverse. Kata ini berasal dari bentuk terikat meta- yang berarti 'perubahan; transformasi' atau 'melampaui, di atas, atau berada di tingkat yang lebih tinggi' dan semesta yang berarti 'seluruh; segenap; semuanya' dan '(berlaku untuk) seluruh dunia; universal'. Metamesta menurut KBBI adalah 'ruang realitas virtual dalam lingkungan tiga dimensi yang dihasilkan melalui program komputer'. Kata ini pertama kali tercatat di KBBI pada April 2022.



Kata Tahun Ini dalam KBBI

III. Merdeka Belajar Episode ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah

Menurut UNESCO, dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, telah ada 200 bahasa daerah di dunia yang punah. Di Indonesia masih terdapat sekitar 718 bahasa daerah. Namun, banyak bahasa daerah yang kondisinya terancam punah dan kritis. Penyebab utama kepunahan bahasa daerah adalah karena para penutur jadinya tidak lagi menggunakan dan mewariskan bahasanya kepada generasi berikutnya. Bahasa bukan sekadar sekumpulan kata atau seperangkat kaidah tata bahasa, tetapi sebagai khazanah kekayaan budaya, pemikiran, dan pengetahuan. Kepunahan bahasa berarti hilangnya kekayaan batin para penutur bahasa tersebut. Merdeka belajar episode revitalisasi bahasa daerah merupakan program baru yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perlindungan bahasa daerah.

Prinsip dari Merdeka Belajar Episode ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah adalah sebagai berikut.

- 1) Dinamis, berorientasi pada pengembangan, dan bukan sekedar memproteksi bahasa.
- 2) Adaptif dengan situasi lingkungan sekolah dan masyarakat tuturnya.
- 3) Regenerasi dengan fokus pada penutur muda di tingkat sekolah dasar dan menengah.
- 4) Merdeka berkreasi dalam penggunaan bahasanya.

MERDEKA BELAJAR
EPISODE KETUJUH BELAS
REVITALISASI BAHASA DAERAH

Sasaran Revitalisasi Bahasa Daerah: Komunitas Tutur



Komunitas Tutur

1.491 KOMUNITAS/PEGIAT

Pelibatan intensif keluarga, para maestro, dan pegiat perlindungan bahasa dan sastra dalam:

- penyusunan model pembelajaran bahasa daerah;
- pengayaan materi bahasa daerah dalam kurikulum; dan
- perumusan muatan lokal kebahasaan dan kesastraan.

MERDEKA BELAJAR
EPISODE KETUJUH BELAS
REVITALISASI BAHASA DAERAH

Sasaran Revitalisasi Bahasa Daerah: Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas



Guru, kepala sekolah, dan pengawas

29.370 GURU 17.955 KEPALA SEKOLAH

1.175 PENGAWAS

- melatih guru utama (*training of trainers*) serta guru-guru bahasa daerah;
- mengadopsi prinsip fleksibilitas, inovatif, kreatif, dan menyenangkan yang berpusat pada siswa;
- mengadaptasi model pembelajaran sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing; serta
- membangun kreativitas melalui bengkel bahasa dan sastra.

MERDEKA BELAJAR
EPISODE KETUJUH BELAS
REVITALISASI BAHASA DAERAH

Sasaran Revitalisasi Bahasa Daerah: Siswa



Siswa

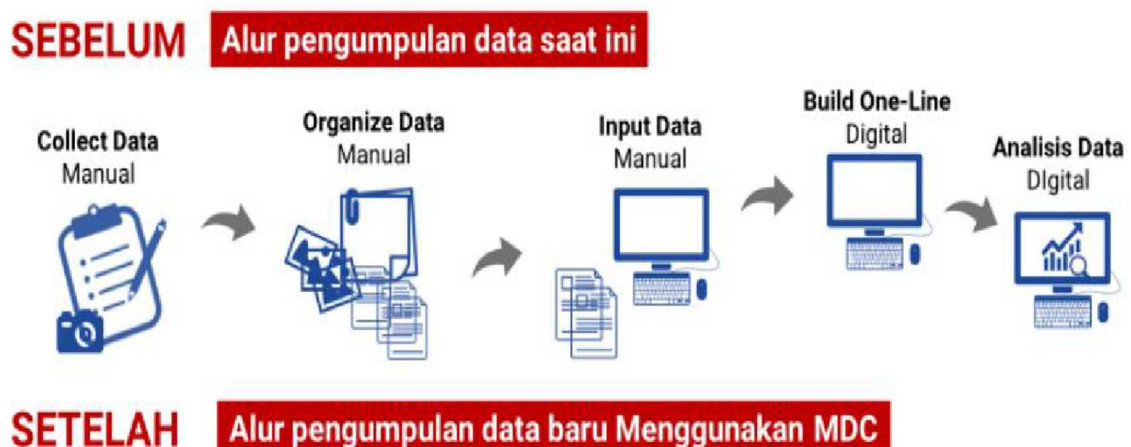
- 1.563.720 SISWA
- 15.236 SEKOLAH

- dapat memilih materi sesuai dengan minatnya;
- bangga menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi;
- didorong untuk memublikasikan hasil karyanya, ditambah liputan media massa dan media sosial; dan
- didorong untuk mengikuti festival berjenjang di tingkat kelompok/pusat belajar, kabupaten/kota, dan provinsi.

Dampak dari inovasi Merdeka belajar episode ke 17 ini tentunya adalah tersedianya data dan informasi serta dukungan dari berbagai pihak dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah.

IV. Aplikasi Daya Hidup Bahasa (VIBA)

Kegiatan Penyusunan Aplikasi Daya Hidup Bahasa mempunyai keluaran berupa sebuah aplikasi yang digunakan untuk pengumpulan data daya hidup bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Aplikasi ini dinamakan Aplikasi VIBA, singkatan dari Vitalitas Bahasa. Dengan adanya inovasi aplikasi VIBA ini tentunya memiliki dampak yang sangat signifikan dibanding menggunakan cara manual, yaitu pengumpulan data lebih fleksibel dan mempercepat kinerja.



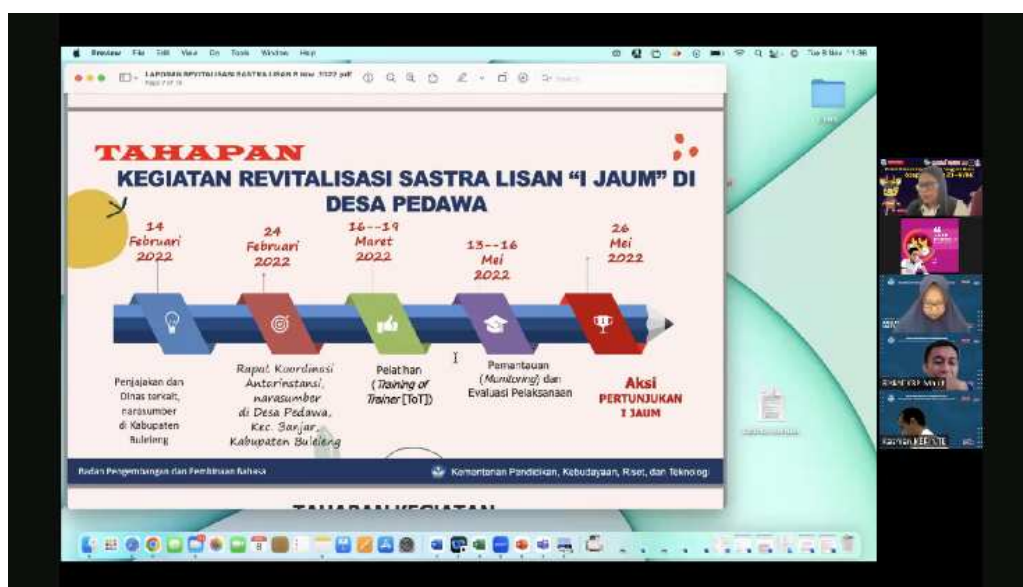
Perbandingan Alur Pengumpulan Data Secara Manual dan Aplikasi

V. Diseminasi Pelindungan Sastra dalam Bentuk Daring

Diseminasi Pelindungan Sastra dalam bentuk diskusi daring. Dampak dari diskusi daring ini adalah masyarakat dapat mengetahui kegiatan dan produk dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, khususnya melalui KKLP Pelindungan dan Pemodernan.

VI. Diseminasi Seminar Hasil Pelindungan Sastra secara Daring

Diseminasi Seminar Hasil Pelindungan sastra yang diselenggarakan secara daring. Kegiatan ini berdampak pada hasil kerja revitalisasi sastra yang dilakukan oleh Balai/Kantor Bahasa di daerah dan keterlibatan masyarakat atau komunitas dalam revitalisasi sastra tersebut.



2. Penghargaan

Pada tahun 2022 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tidak memiliki penghargaan yang diberikan baik di internal maupun di luar/eksternal Kemdikbudristek. Keadaan ini tentunya memacu Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra untuk lebih berkomitmen dalam berkinerja agar lebih baik di masa yang akan datang.

3. Program Kolaborasi/*Collaborative*

Pada tahun 2022 Pusat Pengembangan Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra melakukan program kolaborasi/*collaborative* yaitu:

I. Pembuatan Film Animasi

Pihak-pihak yang terlibat yaitu:

1. AINAKI (Asosiasi Industri Animasi Indonesia)

AINAKI selaku pihak yang bergerak dalam dunia industri animasi berperan sebagai tim pakar yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembuatan 32 produk pemodernan sastra berupa film animasi yang dikerjakan oleh tim praktisi dan tim produksi.

2. Mitrasdudi (Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri)

Mitrasdudi di bawah Direktorat Vokasi, Kemendikbudristek berperan sebagai salah satu unit utama kemendikbudristek yang bertanggung jawab merekomendasikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) yang berada di bawah Mitrasdudi untuk menjadi tim produksi pembuatan produk pemodernan sastra.

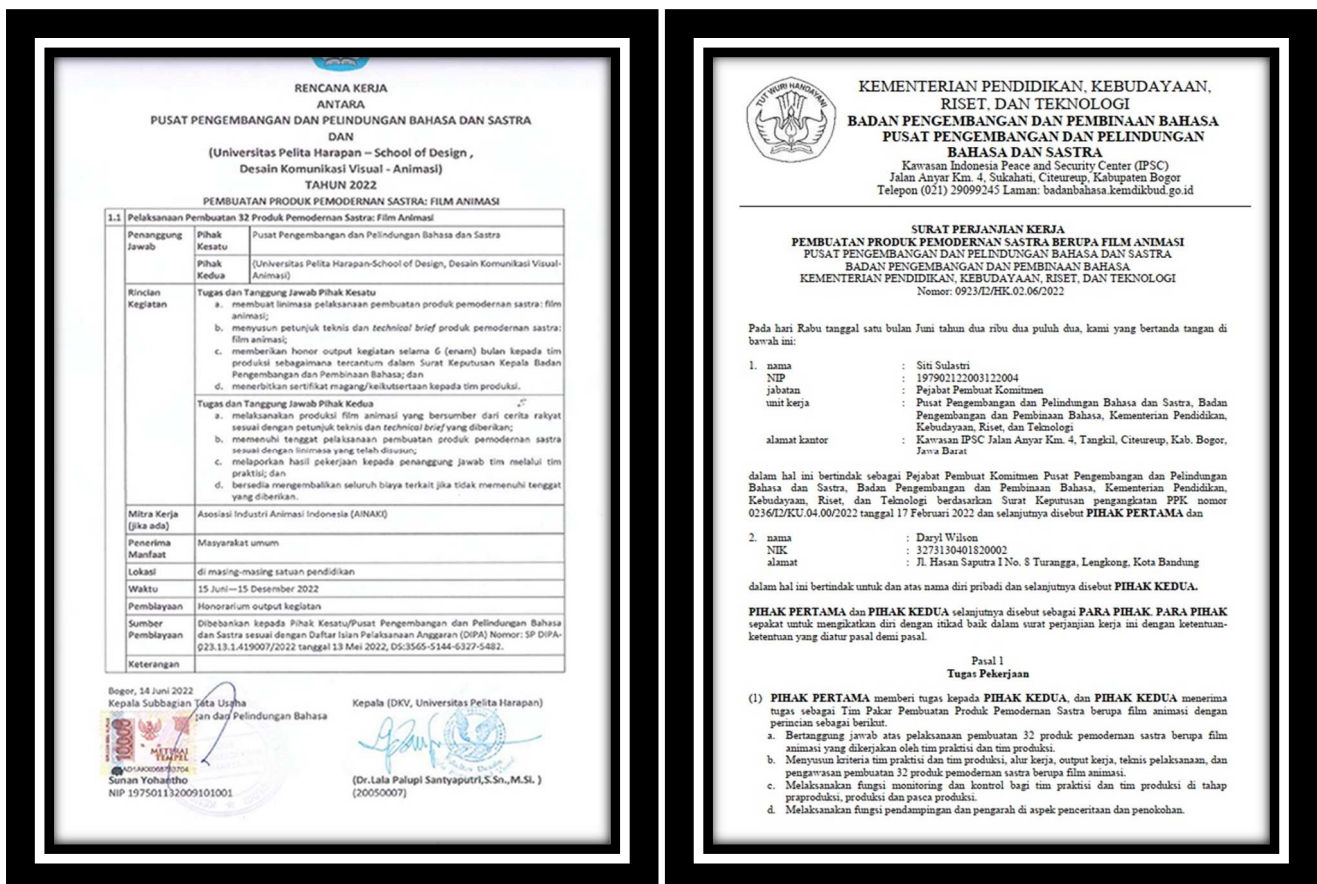
3. Asprodi

Asosiasi Program Studi Desain Komunikasi Visual (Asprodi DKV) bertanggung jawab merekomendasikan universitas yang tergabung dalam Asprodi di seluruh wilayah Indonesia untuk menjadi tim produksi pembuatan produk pemodernan sastra.

Dampak dari kolaborasi itu adalah:

- I. Terjalannya kerja sama yang baik antara Badan Bahasa dengan unit utama kemendikbudristek(Mitrasdudi), Asprodi, dan dunia industri (AINAKI).
- II. Dunia industri animasi mengalami perkembangan jaringan dengan masuknya jaringan instansi pemerintah yang bekerja sama dalam membuat film animasi.

Setelah tercapai kesepakatan, kemudian diadakan penyusunan dan penandatanganan dokumen kerja sama. Berikut dokumen bukti pelaksanaan kerjasama tersebut.



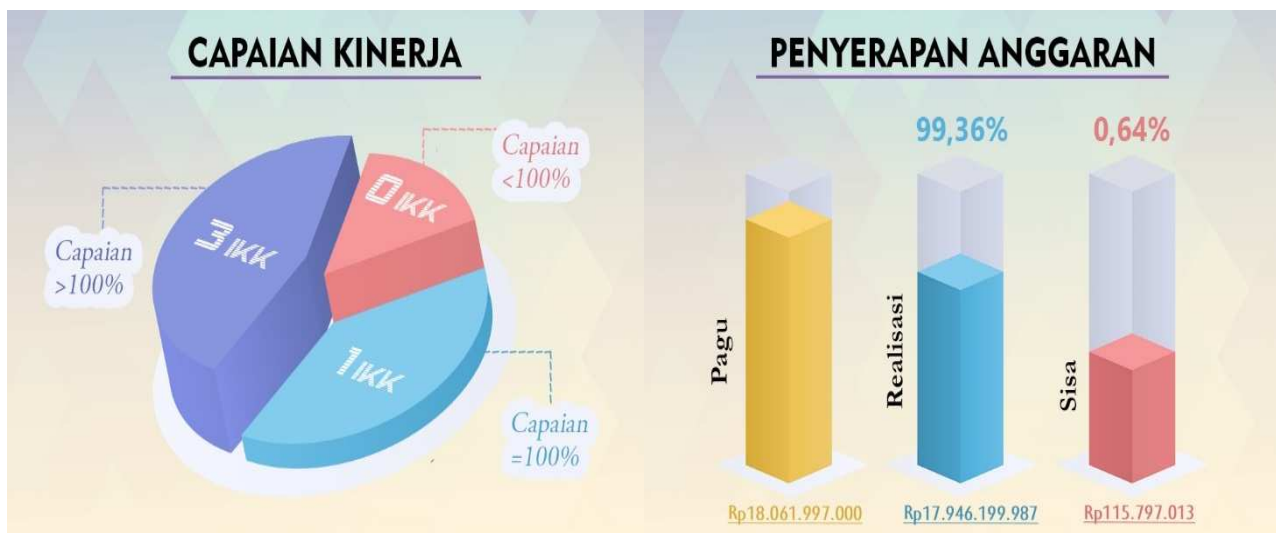
IV

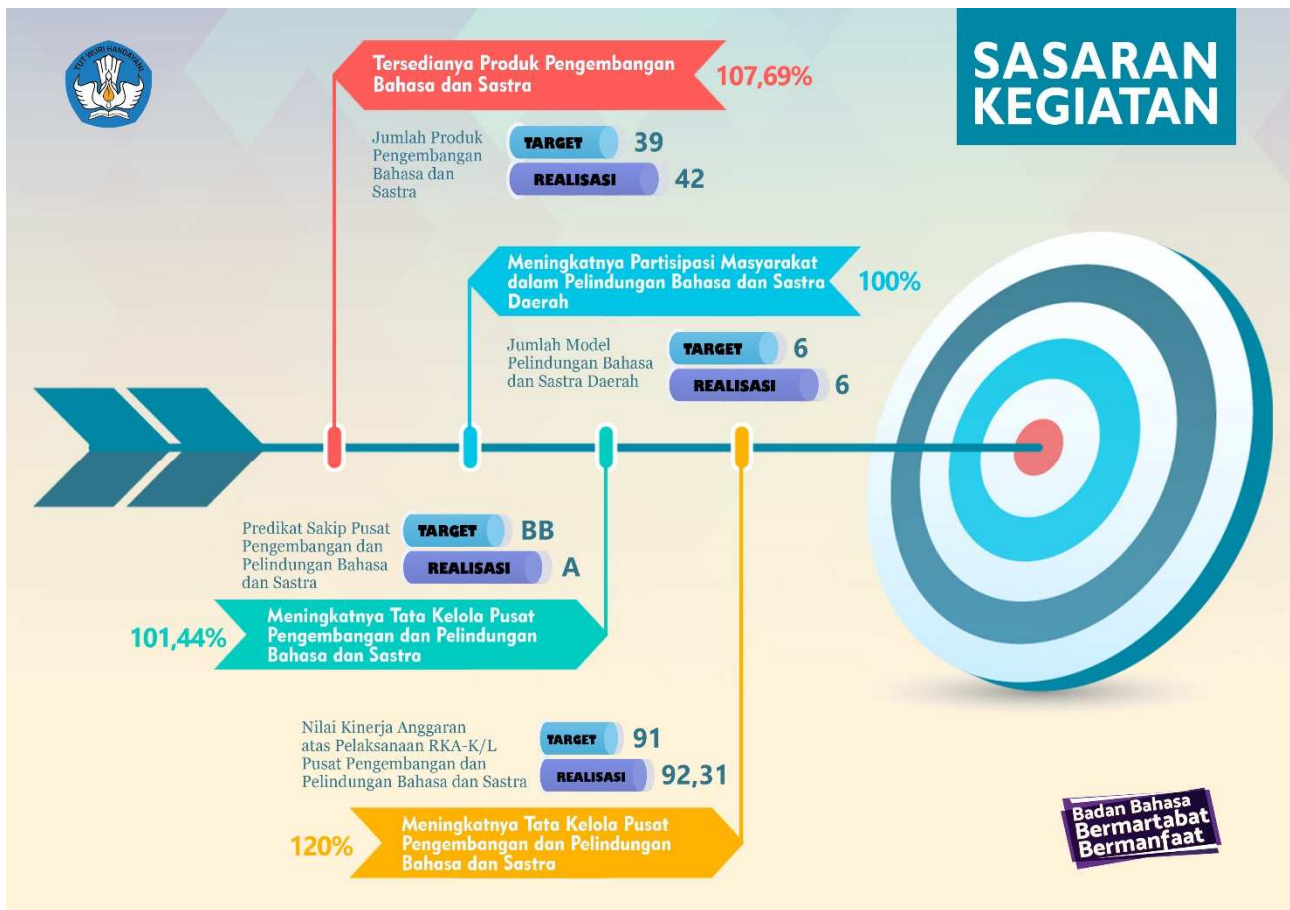
BAB PENUTUP

A. SIMPULAN

Laporan kinerja disusun sebagai instrumen pertanggungjawaban Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra sebagai satuan kerja dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam melaksanakan tugas dan fungsi instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2022, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Pada Perjanjian Kinerja antara Kepala Pusat Pengembangan dan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ditetapkan 3 sasaran kegiatan (SK) dan 4 indikator kinerja kegiatan (IKK), dengan pencapaian 3 IKK lebih target, dan 1 IKK sesuai dengan target. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.





B. FOKUS PERBAIKAN

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh berbagai faktor. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun 2022 telah berupaya secara maksimal melakukan peningkatan kinerja melalui berbagai macam metode. Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen bersama pimpinan dan seluruh staf.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal perlu mendapat perhatian dan beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan dalam meningkatkan kinerja organisasi antara lain:

1. Memantapkan konsep program dan kegiatan dengan mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan, pelaksana kegiatan, dan pakar/narasumber.
2. Mematangkan jadwal pelaksanaan kegiatan disertai dengan rencana penarikan dana.
3. Membangun komunikasi intensif dengan pakar dan narasumber.
4. Mengajukan peningkatan layanan awan teknologi informasi ke Pusdatin Kemdikbudristek terkait penggunaan penyimpanan data, peladen, dan pita data sesuai kebutuhan.
5. Mengintensifkan kolaborasi dengan melibatkan unsur-unsur pentahelik (pemerintah, akademisi, badan usaha/industri, masyarakat/komunitas, dan media).
6. Melakukan koordinasi antara pelaksana kegiatan dengan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksana kegiatan dengan tim administrasi Tata Usaha.

-
7. Melakukan evaluasi dan monitoring progres pelaksanaan program kegiatan dan anggaran secara berkala setiap akhir bulan.
 8. Peningkatan kompetensi bagi seluruh pegawai baik teknis maupun administrasi.
 9. Penyediaan fasilitas perkantoran bagi pegawai.

C. LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Awal
2. Perjanjian Kinerja Akhir
3. Pengukuran Kinerja
4. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu



**Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Dengan
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Imam Budi Utomo

Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : E. Aminudin Aziz

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 30 Maret 2022

**Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa**



E. Aminudin Aziz

**Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra**



Imam Budi Utomo



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	[IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	39
2	[SK 2] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	[IKK 2.1] Jumlah model perlindungan bahasa dan sastra daerah	6
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	BB
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	91

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Rp. 9.275.729.000
2	2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp. 10.674.463.000
		TOTAL	Rp. 19.950.192.000

Jakarta, 30 Maret 2022

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



E. Aminudin Aziz

Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra



Imam Budi Utomo



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Dengan
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Imam Budi Utomo

Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : E. Aminudin Aziz

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 29 Desember 2022

**Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,**



E. Aminudin Aziz

**Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra,**



Imam Budi Utomo



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	[IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	39
2	[SK 2] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	[IKK 2.1] Jumlah model perlindungan bahasa dan sastra daerah	6
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	BB
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	91

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Rp. 8.173.512.000
2	2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp. 9.888.485.000
		TOTAL	Rp. 18.061.997.000

Jakarta, 29 Desember 2022

**Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,**



E. Aminudin Aziz

**Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra,**



Imam Budi Utomo



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

I	[SK 1.0] Pengembangan buku bahasa Perak Pengembangan dan Redistribusi Bahasa dan Sastra	[DK 1.2] Riset & Pengembangan atau Riset dan Pengembangan atau Pengembangan Bahasa dan Sastra	R&D	SI	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 0	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 0	TW1 : Progress / Kegiatan : Pilot research sudah dilakukan upaya-upaya dalam meningkatkan nilai kinerja anggaran. Pergerakan nilai RPA dan RKA sudah diujicobakan supaya lebih stabil dan optimal. Kendala / Permasalahan : Kesulitan dalam melakukan input RPD sebagai komponen nilai dalam perbaikan RPA. Strategi / Tindak Lanjut : Memaksimalkan komponen perbaikan yang lain. TW2 : Progress / Kegiatan : Dalam proses peninjauan kinerja melalui nilai RPA dan RKA. Sudah dilakukan tahap awal koordinasi baik pada internal administratif maupun dengan pelaksanaan kegiatan teknis. Kendala / Permasalahan : Kendala utama pada Pribangin adalah realisasi anggaran masih belum maksimal. Strategi / Tindak Lanjut : Memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan mematuhi dan berorientasi terhadap jadwal kegiatan yang sudah ditetapkan. Selain itu komitmen dan koordinasi KEPJ sangat dengan unit baru terus diperkuat. TW3 : Progress / Kegiatan : Dalam proses pencapaian dengan melibatkan kegiatan secara rutin, secara prosedur dan jadwal. Kendala / Permasalahan : Kendala yang terjadi adalah 1. Jadwal yang tidak proporsional dan tidak realistis pelaksanaan jadwal kegiatan oleh tim. 2. Beberapa indikator atau hasil-hasil pada akhir tahun. Strategi / Tindak Lanjut : Strategi untuk menjalukannya yaitu: 1. Mengevaluasi dan mengontrol ulang nilai jadwal kegiatan. 2. Perlu dibuat beberapa tindakan perbaikan khusus atau intervensi langsung dan penguatan mengenai pelaksanaan kegiatan supaya masalah dapat diatasi secara maksimal. 3. Akhir tahun. TW4 : Progress / Kegiatan : Kegiatan sudah selesai dilaksanakan seluruhnya. Kendala / Permasalahan : Salah satu kegiatan yang terhambat karena pada akhir tahun sehingga masalah anggaran dan efisiensi baru terlihat pada akhir tahun anggaran. Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan koordinasi melalui rapat antara tim teknis kegiatan dengan bagian perencanaan dan keuangan untuk membahas pelaksanaan dan masalah program dan anggaran secara rutin dalam rangka optimalisasi nilai pada kinerja anggaran. Serta upaya memaksimalkan nilai anggaran dalam meningkatkan kualitas capaian output, dan mengoptimalkan kegiatan pelaksanaan program dan RPD halaman 03 DPA.
---	---	---	-----	----	--	--	--



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	Produk Kodifikasi Bahasa	7.0000	produk	0	0	3	10	Rp. 2.435.330.000
2	[052] Pemerikayaan Kosakata			1000	3200	3200	3200	Rp. 632.781.000
3	[053] Pengembangan Kamus			0	0	2	7	Rp. 758.781.000
4	[054] Diseminasi Pengembangan Bahasa			0	2	7	8	Rp. 409.632.000
5	[055] Integrasi Produk Kosakata dengan TIK			0	0	2	2	Rp. 178.103.000
6	[056] Penyusunan Tata Bahasa Kontemporer			0	0	1	2	Rp. 456.033.000
7	Produk Pengembangan Sastra	32.0000	produk	0	0	0	32	Rp. 3.964.050.000
8	[052] Penyusunan Bahan Pengembangan Sastra			0	1	3	3	Rp. 242.548.000
9	[053] Diseminasi Pengembangan Sastra			0	0	0	3	Rp. 22.388.000
10	[055] Pemodernan Sastra			0	0	0	32	Rp. 3.699.114.000
11	Model Pelindungan Bahasa	3.0000	model	0	3	3	3	Rp. 1.102.465.000
12	[052] Penyusunan model pelindungan bahasa			0	3	3	3	Rp. 439.511.000
13	[053] Diseminasi pelindungan bahasa			1	1	1	3	Rp. 287.207.000
14	[054] Pengayaan bahan laboratorium keteknikan bahasa			0	5	11	24	Rp. 375.747.000
15	Model Pelindungan Sastra	3.0000	model	0	3	3	3	Rp. 671.667.000
16	[052] Penyusunan model pelindungan sastra			0	3	3	3	Rp. 641.478.000
17	[053] Diseminasi Pelindungan Sastra			0	0	1	4	Rp. 30.189.000
18	Layanan Umum	1.0000	Layanan	1	1	1	1	Rp. 1.440.375.000
19	[051] Pelayanan Kerumahahtanggaan dan Perlengkapan			3	6	9	12	Rp. 286.682.000
20	[053] Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			3	6	9	12	Rp. 7.829.000
21	[054] Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Pembendaharaan			3	6	9	12	Rp. 319.465.000
22	[056] Pelayanan SDM			3	6	9	12	Rp. 808.239.000
23	[059] Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Internal			3	6	9	12	Rp. 18.160.000
24	Layanan Perkantoran	1.0000	Layanan	1	1	1	1	Rp. 8.227.110.000
25	[001] Gaji dan Tunjangan			3	6	9	12	Rp. 6.736.314.000
26	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor			3	6	9	12	Rp. 1.490.796.000
27	Layanan Sarana Internal	1.0000	Unit	0	0	0	1	Rp. 221.000.000
28	[996] Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			0	10	11	12	Rp. 215.930.000
29	[997] Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran			0	1	1	1	Rp. 5.070.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 18.061.997.000



Catatan:
 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu laporan kinerja PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bogor, 23 Januari 2023

Ketua Tim Reviu



Iwan Budi Utomo

186605201991031004